

**LAPORAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2019**



**OLEH
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang tyaha Esa karena berkat dan perkenannya Laporan kinerja InstansJ Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota oenpasar dapat disusun dan selesai sesuei waktu yang telah ditetapkan.

LKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Denpasar setama lahun 20la sebagaimana dirumuskan dalam rencana strategis. Masih banyak kekLrrangan dan hambatan yang kami temoi daldm penyilsunan LKIP dan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar.

Kami berharap mendapatkan masukan yang besifat konstruktif sebagai perbalkan dimasa yang akan datang.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan LKIP ini, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa Asung Kertha Wara Nugraha kepada kita semua

Denpasar, Pebruari 2019

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Lufi Putu Sri Armini, M.Kes

NIP. 196204191988032007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Uraian singkat organisasi	3
1.3 Sumberdaya organisasi	15
1.4 Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	19
2.2 Perjanjian Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	37
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	40
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	105
074.2 Saran	107
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja 2019	
2. Indikator Kinerja Utama 2019	

3. RKT 2019
4. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja 2019
5. Realisasi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019
6. Case Cading Dikes Kota Denpasar Tahun 2019
7. Perjanjian Kinerja 2020
8. Indikator Kinerja Utama 2020
9. RKT 2020
10. Case Cading Dikes Kota Denpasar Tahun 2020
11. Rencana aksi atas perjanjian kinerja Tahun 2020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar merupakan laporan kinerja tahunan dan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi tahun anggaran 2019 kepada Walikota Denpasar, dan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 7 th 2008 dan perubahannya No. 2 Th 2009 Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kota Denpasar. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dalam bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Tugas ini sejalan dengan sasaran ke lima pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar yaitu Meningkatkan derajat Kesehatan penduduk Kota Denpasar. Hasil evaluasi terhadap perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar 95% indikator sasaran sudah berkinerja baik.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2019 akan ditingkatkan dengan cara memanfaatkan secara optimal segala peluang dan sumber daya yang ada dan mencari solusi atas hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi selama ini.

BAB I

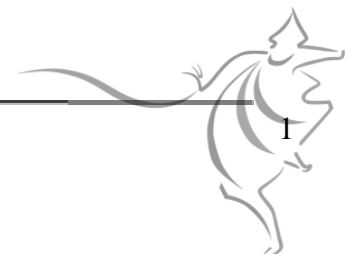
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur legitimate, sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan berhasil guna dan berdaya guna bersih dan bertanggung jawab. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Rieview atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik serta penggunaan anggaran setiap akhir tahun anggaran.

Memperhatikan Permenpan No. 12 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Penetapan Kinerja (PK) Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Kesehatan Kota Denpasar Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2018.

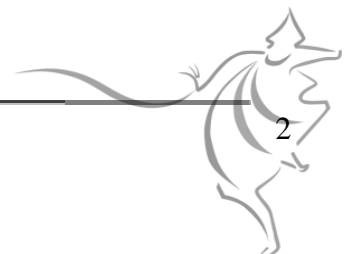
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Kota Denpasar merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi dan sasaran yang telah ditetapkan.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta berbagai upaya yang telah dilakukan selama tahun anggaran dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Walikota Denpasar serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah:

- Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
- Undang- undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan amntara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2016-2021.
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nomor 050/5742/Dikes/2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016-2021



1.2 URAIAN SINGKAT ORGANISASI

Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa kesehatan merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 7 th 2008 dan perubahannya No. 2 Th 2009 maka Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kedudukan

- a. Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Denpasar.
- b. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas Pokok

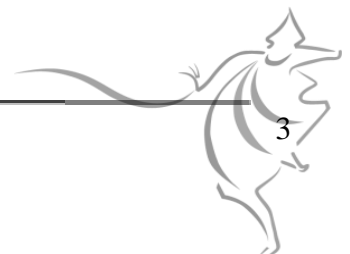
Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dalam bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

3. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pemberian, perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah,



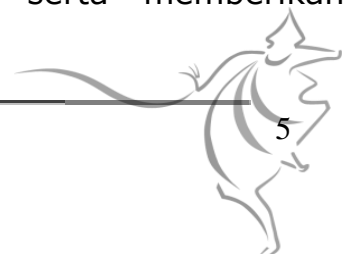
(1) Kepala Dinas memiliki tugas :

- a. menetapkan program kerja Dinas Kesehatan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kinerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membuat perumusan kebijakan kesekretariatan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. memberikan petunjuk dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. memberikan pelayanan perizinan dan rekomendasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan perizinan;
- i. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- j. membina dan melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan organisasi lain di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

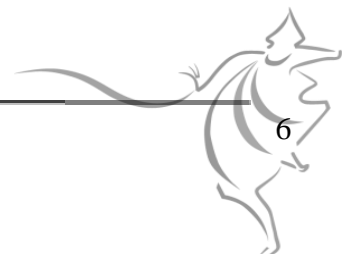
(2) Sekretaris memiliki tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas - tugas bidang serta memberikan



- pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan perencanaan program, data dan informasi kesehatan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya tertib pengelolaan keuangan yang akuntabel;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, penerimaan tamu dan Administrasi Perjalanan Dinas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

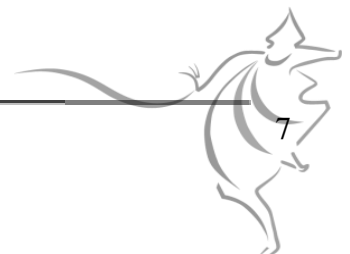
Sekretariat membawahi 3 sub bagian yaitu: 1) Subbagian Perencanaan data dan pelaporan, 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dan 3) Subbagian Keuangan



3) BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menurunkan angka kesakitan kematian ibu dan bayi serta menurunkan prevalensi gizi buruk;
- f. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat meningkatkan pemberdayaan dan derajat kesehatan masyarakat;
- g. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku agar



meningkatkan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

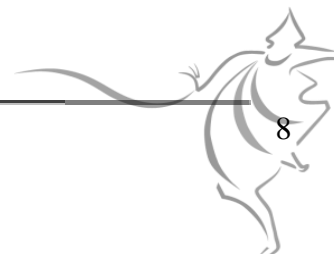
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kesehatan Masyarakat;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 seksi yaitu 1) Seksi kesehatan keluarga dan gizi, 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, 3) Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.

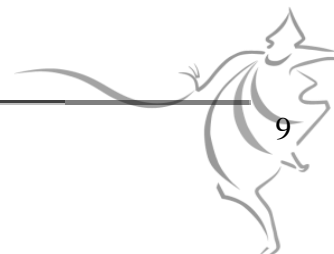
5) BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi kegiatan Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- f. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menurunkan kasus penyakit menular;
- g. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menurunkan kasus penyakit tidak menular;
- h. merumuskan, melaksanakan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAFSA), dan kesehatan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAFSA), dan kesehatan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



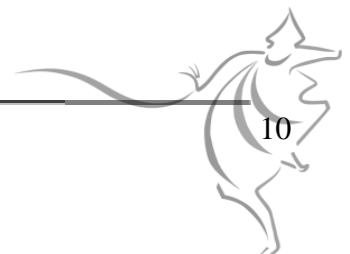
- j. menyebarluaskan informasi cara-cara pengendalian sumber-sumber penyakit sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan edukasi kepada masyarakat;
- k. merencanakan kegiatan penelitian pengendalian, pengawasan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menurunkan dampak KLB;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari 3 seksi yaitu 1) seksi surveilans dan imunisasi, 2) Seksi pencegahan dan Pengendalian Penyakit Manular, 3) Seksi pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Manular dan Kesehatan Jiwa

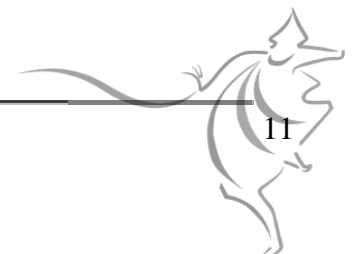
6) BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan memiliki tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;



- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas dan kegiatan berjalan dengan baik;
- f. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas dan kegiatan berjalan dengan baik;
- g. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas dan kegiatan berjalan dengan baik;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Bidang Pelayanan kesehatan terdiri dari 3 seksi yaitu: 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

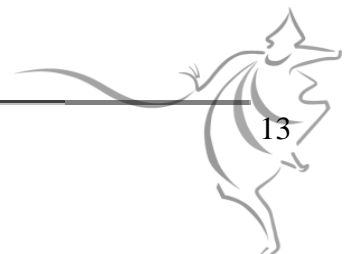
7) BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas :

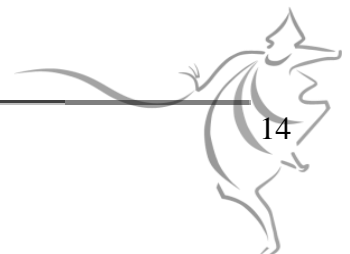
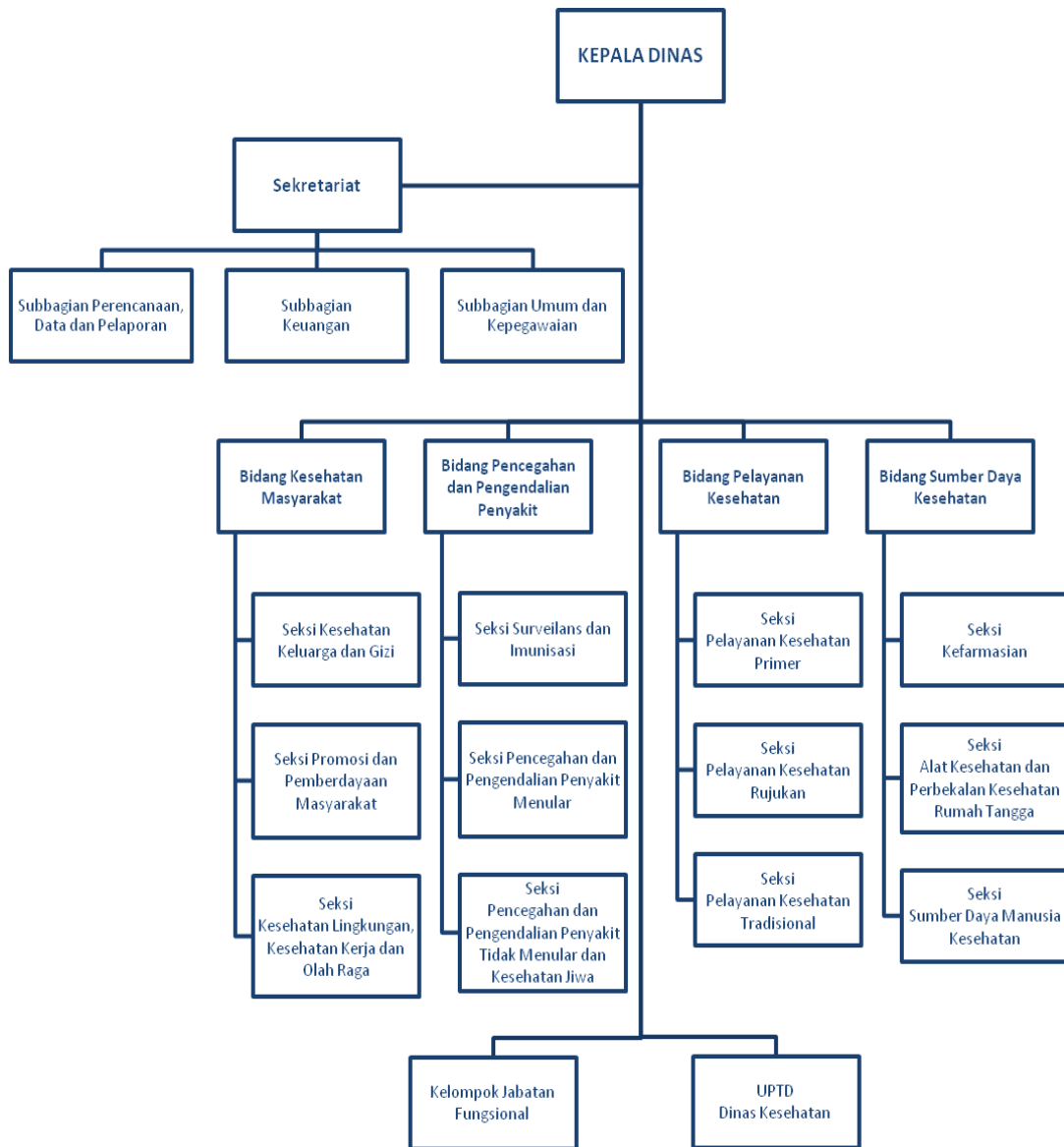
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi kegiatan seksi Kefarmasian sesuai peraturan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi;
- f. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi kegiatan seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai peraturan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi;
- g. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi kegiatan seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang sumber daya kesehatan terdiri dari 3 seksi yaitu: 1) Seksi Kefarmasian, 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
SESUAI PP NO. 18 TAHUN 2016**



1.3 SUMBER DAYA ORGANISASI

Berjalannya organisasi Dinas Kesehatan Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya manusia material maupun dana.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang ada pada sarana pelayanan di dinas kesehatan Kota Denpasar, puskesmas dan upt farmasi dan pengawasan makanan bila dilihat berdasarkan pendidikannya adalah :

TABEL 1.1 REKAPITULASI TENAGA BERDASARKAN PENDIDIKAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2019

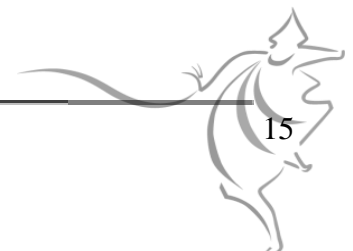
	Pendidikan	DU I	DU II	DU III	DT I	DT II	DS I	DS II	DS III	DS IV	DB I	DB II
1	Dokter	4	4	5	8	4	4	4	3	5	6	5
2	Dokter gigi	4	5	3	5	3	3	4	3	4	6	2
3	Perawat	9	9	6	13	9	6	11	6	11	6	6
4	Bidan	7	7	11	25	12	7	12	6	20	19	8
5	Kes Masyarakat	1	1	3	2	2	1	0	0	2	2	0
26	Kes Lingkungan	2	1	3	2	2	2	3	2	2	4	2
7	Analisis kesehatan											
8	Teknis farmasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Gizi	3	3	2	2	3	2	2	3	2	4	3
10	Non Kesehatan	5	3	3	3	3	5	3	3	2	3	6

Sumber: Sub Bag Kepeg dan Umum Dikes Kota Denpasar Tahun 2019

b. Sumber daya material

Di Kota Denpasar terdapat 11 puskesmas, 25 pustu dan 1 UPT Farmasi dan Pengawasan makanan yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Bila dilihat rasio sarana tersebut terhadap jumlah penduduk:

1. Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk adalah 2 (dua) Puskesmas melayani 100.000 penduduk.



2. Rasio Puskesmas pembantu (Pustu) terhadap 100.000 penduduk adalah 4 (empat) Pustu melayani 100.000 penduduk.
3. Rasio Puskesmas Keliling (Pusling) terhadap 100.000 penduduk adalah 2 (dua) Pusling melayani 100.000 penduduk.

Tingginya rasio sarana kesehatan terhadap penduduk membantu meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila dilihat dari wilayah kerja Kecamatan, jumlah rumah sakit, puskesmas dan pustu dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kecamatan di Kota Denpasar tahun 2019

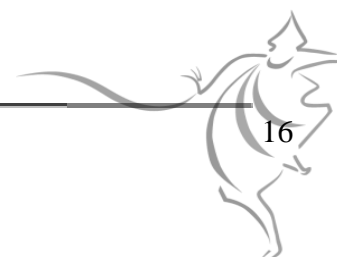
No	Kecamatan	Rumah sakit	Puskesmas	Pustu
1	Denpasar Selatan	3	4	6
2	Denpasar Timur	2	2	6
3	Denpasar Barat	12	2	7
4	Denpasar Utara	4	3	6
	Jumlah	21	11	25

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan tabel diatas jumlah fasilitas kesehatan di Kota Denpasar sudah cukup memadai apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan.

c. Sumber daya Informasi

Pemerintah daerah telah memberikan perhatian yang lebih terhadap penyediaan informasi kesehatan, hal ini terbukti dengan telah terpasangnya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas sehingga pelayanan dasar kesehatan di Puskesmas lebih lancar.



d. Dana

Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar, direalisasikan melalui 18 program dan 54 kegiatan dengan mengalokasikan belanja sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung	: Rp. 69.367.431.552,00
Belanja Pegawai	: Rp. 69.367.431.552,00
2. Belanja Langsung	: Rp. 101.125.118.920,00
Belanja Pegawai	: Rp. 339.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 95.445.641.497,36
Belanja Modal	: Rp. 5.340.077.423,00
3. Total belanja langsung dan Tak langsung	: RP. 191.604.202.911.52

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam LKIP Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencakup:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan tentang penjelasan umum organisasi

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab ini disajikan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2019

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2019

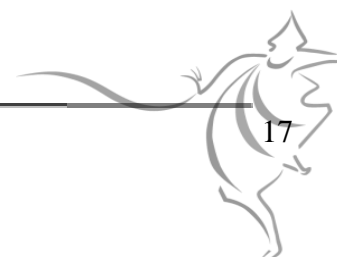
B. Realisasi Anggaran Tahun 2019

BAB IV Penutup

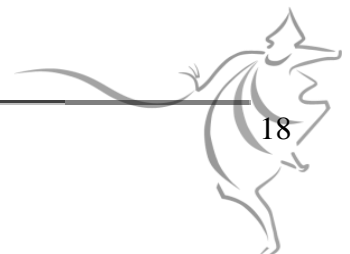
Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2019 serta langkah dimasa mendatang yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja 2019



2. Indikator Kinerja Utama 2019
3. RKT 2019
4. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja 2019
5. Realisasi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019
6. Perjanjian Kinerja 2020
7. Indikator Kinerja Utama 2020
8. RKT 2020
9. Rencana aksi atas perjanjian kinerja Tahun 2020
10. Pohon Masalah
11. Pohon Tujuan
12. Pohon Kinerja



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

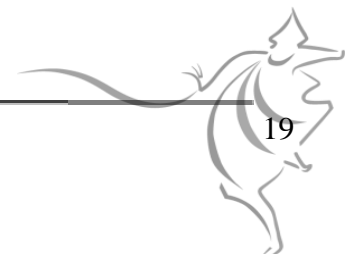
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 5 tahun (2016-2021), dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas nasional dan pemerintah daerah yaitu standar pelayanan minimal (SPM) serta sasaran sesuai dengan RPJM Pemerintah Kota Denpasar telah disusun, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar nomor: 050/5742/Dikes/2017 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

2.1.1 Pernyataan Visi

Visi Pemerintah Kota Denpasar adalah “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan” dengan Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 antara lain:

2.1.2 Pernyataan Misi

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement).



4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

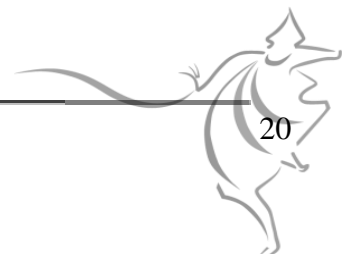
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan mengacu ke misi walikota yang ke dua yaitu Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal. Sasaran ke lima yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indicator angka harapan hidup. Padmaksarannya adalah meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) Menuju Kebahagiaan dan dari 33 program dinas kesehatan mengacu kepada program 1) Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas kesehatan dan, 2) Mewujudkan pelayanan prima berlandaskan Sewaka Dharma.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) Dinas kesehatan Kota Denpasar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun

2.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis penting yang menjadi permasalahan kesehatan Kota Denpasar adalah:

1. Masih rendahnya status kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
2. Masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
3. Belum optimalnya ketersediaan, mutu dan tata kelola sumber daya kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar
4. Masih tingginya kejadian penyakit menular dan tidak menular



2.1.4 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran

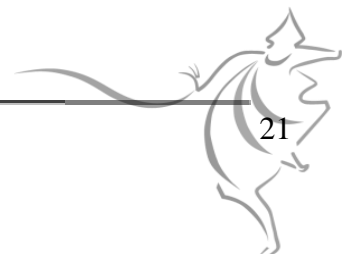
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai – nilai luhur dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan yang lebih baik, yang menjadi arah perjalanan dinas dengan berdasarkan pada kreteria –kreteria dan kewenangan yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat.

Tujuan:

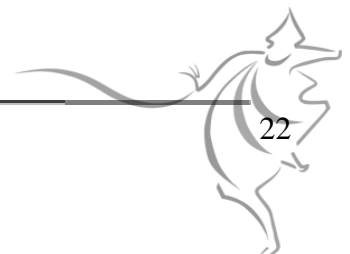
1. Meningkatkan ketersediaan, mutu dan tata kelola sumber daya kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
3. Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan lansia
4. Meningkatkan status gizi masyarakat
5. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan wabah
6. Meningkatnya kesehatan lingkungan. Tempat tempat umum, kesehatan makanan dan keamanan pangan.

Sasaran :

1. Pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran dan meningkatnya kualitas sumberdaya Manusia Kesehatan
2. Meningkatnya kinerja pelayanan Puskesmas
3. Ketersediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas.
4. Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penduduk miskin
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
6. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi anak remaja dan lansia

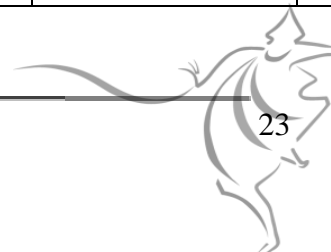


7. Mengatasi masalah gizi di masyarakat terutama kelompok rentan terutama bayi, balita dan ibu hamil
8. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan wabah
9. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, Tempat – tempat umum, kesehatan makanan dan keamanan pangan

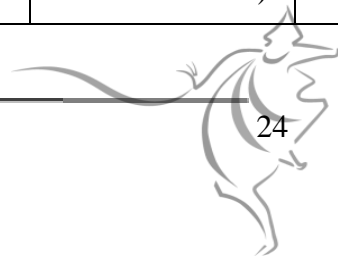


Tujuan sasaran dan indikator tujuan

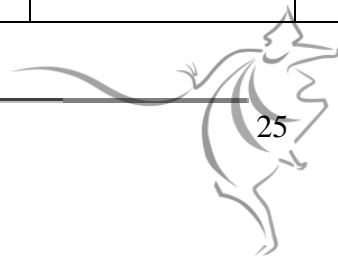
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan ketersediaan, mutu dan tata kelola sumber daya kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar	Pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran dan meningkatnya kualitas sumberdaya Manusia Kesehatan	Terwujudnya pengadaan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di dikes puskesmas dan jaringannya	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kinerja pelayanan Puskesmas	Persentase Puskesmas terakreditasi	27%	36%	100%	100%	100%
		Ketersediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas	Persentase ketersediaan obat 95% di Puskesmas pada tahun 2020	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penduduk miskin	100% penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%



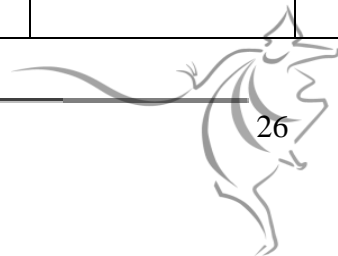
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Meningkatnya peran serta masyarakat termasuk swasta dalam pembiayaan kesehatan	Persentase RT ber PHBS	75%	78%	80%	81%	82%
3	Meningkatkan status gizi masyarakat	Meningkatkan status gizi kelompok rentan terutama bayi balita dan ibu hamil	Menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk	8%	8%	6%	5%	4%
			100% Balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase bumil mendapat tablet tambah darah (TTD)	99%	99%	99%	99%	99%
4	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan wabah	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan wabah	Menurunkan incidence rate penyakit DBD	210/100000 pddk	205/100000 pddk	200/100000 pddk	195/100000 pddk	195/100000 pddk
			pelayanan kesehatan penyakit tidak menular (DM, hipertensi dan pelayanan pada usia 15-59 tahun)	100%	100%	100%	100%	100%



		Persentase Desa/ kel mengalami KLB ditangani < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		CFR DBD	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
		Pel.Kesehatan orang dengan Resiko HIV	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Diabetes	100%	100 %	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan ODGJ	100%	100 %	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan penduduk berusia 15-59 tahun	100%	100 %	100%	100%	100%

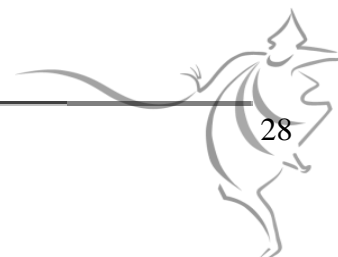


5	Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan lansia	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak, remaja dan lansia	Menurunkan angka kematian ibu melahirkan menjadi 56 per 100.000 KH pada tahun 2021	56/100.000 KH	56/100.000 KH	56/100.000 KH	56/100.000 KH	56/100.000 KH
			Menurunkan angka kematian bayi menjadi 8 per 1000 pada tahun 2021	0,6/1000 KH	0,6/1000 KH	0,6/1000 KH	0,6/1000 KH	0,6/1000 KH
			Menurunkan angka kematian balita	0,7/1000 KH	0,7/1000 KH	0,7/1000 KH	0,7/1000 KH	0,7/1000 KH
			Menurunkan persentase bayi berat lahir rendah (BBLR) menjadi < 5% pada tahun 2021	5%	5%	5%	5%	5%
			Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan menjadi 100% pada 2021	100%	100%	100%	100%	100%
			Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	100%	100%



			Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (lansia)	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	100%
			Presentase KB Aktif	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
			Presentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kes sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase Pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %	100%	100%	100 %	100 %
6	Meningkatnya kesehatan lingkungan. Tempat tempat umum, kesehatan makanan dan keamanan pangan	Meningkatnya kualitas kes ling, Tempat – tempat umum, kesehatan makanan dan keamanan pangan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi dasar	75%	75%	75%	75%	75%

		Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase desa/kel melaksanakan STBM	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	30%	35%	40%	45%	45%
		Persentase hasil produksi rumah tangga tidak mengandung bahan berbahaya	100%	100%	100%	100%	100%

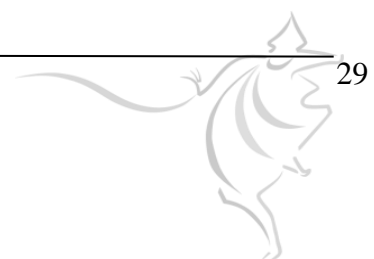


2.1.4 Strategi dan Kebijakan

Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dijalankan dengan "*Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar*" yang merupakan jalur menuju dimensi kehidupan baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 pembangunan di Kota Denpasar ditempuh melalui dua kelompok strategi yaitu strategi implementasi pembangunan dan strategi pengembangan kemampuan pemerintah.

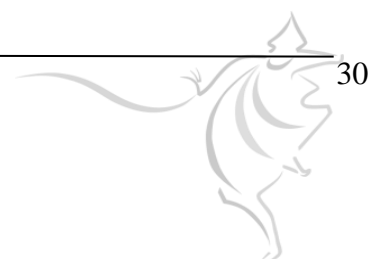
Sedangkan kebijakan pembangunan Kota Denpasar bertumpu pada tiga pilar utama yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas daerah yang sehat dan dinamis serta supremasi hukum. Kebijakan dasar pembangunan Kota Denpasar diarahkan kepada sebelas kebijakan dasar pembangunan. Khusus bidang kesehatan arah kebijakan dasarnya adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah kepada seluruh rakyat yang terdiri dari:

1. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigm sehat, yang memberikan prioritas pada upaya promotif dan preventif dengan tidak meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitative
2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana dan prasarana kesehatan
3. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya
4. Meningkatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban bencana alam dan para tuna sosial lainnya.

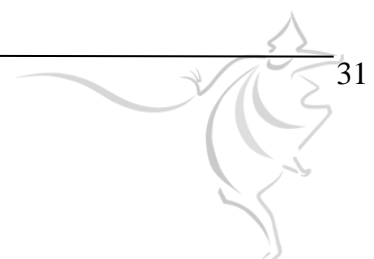


2.1.5 Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
 - 4.1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
 - 4.2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - 5.1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya
 - 5.2. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
 - 5.3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 - 5.5. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - 6.1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
7. Program pengembangan obat asli Indonesia
 - 7.1. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 8.1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
 - 8.2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
 - 8.3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.
 - 8.4. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan
 - 8.5. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I Denpasar Barat
 - 8.6. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas II Denpasar Barat



- 8.7. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I Denpasar Timur
- 8.8. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas II Denpasar Timur
- 8.9. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I Denpasar Utara
- 8.10. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas II Denpasar Utara
- 8.11. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas III Denpasar Utara
- 8.12. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I Denpasar Selatan
- 8.13. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas II Denpasar Selatan
- 8.14. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas III Denpasar Selatan
- 8.15. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas IV Denpasar Selatan
- 8.16. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen BOK kab/kota dan jampersal
- 8.17. Peningkatan pemberdayaan kesehatan remaja
9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - 9.1. Penanggulangan kurang energy protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
 - 9.2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
 - 10.1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
 - 10.2. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Pemukiman
 - 10.3. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Tempat – tempat Umum



11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
 - 11.1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.
 - 11.2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging.
 - 11.3. Pengadaan vaksin penyakit menular
 - 11.4. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.
 - 11.5. Pelayanan pecegahan dan penanggulangan penyakit menular.
 - 11.6. Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah.
 - 11.7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit endemic/epidemik.
 - 11.8. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS
 - 11.9. Pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosa (TBC)
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
 - 12.1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
 - 12.2. Kalibrasi alat – alat kesehatan
 - 12.3. Pembinaan dan penilaian tenaga kesehatan teladan puskesmas
13. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
 - 13.1. Pelayanan operasi katarak
14. Program Kemitraan Asuransi Kesehatan
 - 14.1 Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat
15. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita.
 - 15.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita.
16. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
 - 16.1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia).
17. Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan.
 - 17.1. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga.
 - 17.2. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant.
 - 17.3 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan kantin sekolah
18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.
 - 18.1. Pelayanan kesesehatan ibu dan anak secara terpadu.



18.2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN		TARGET 2019
1. Meningkatkan ketersediaan, mutu dan tata kelola sumber daya kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar	1. Meningkatnya kinerja pelayanan puskesmas	1	Persentase puskesmas terakreditasi	100%
	2. Ketersediaan obat dan alat kesehatan di puskesmas	2	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	100%
	3. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Penduduk miskin	3	Terlayannya penduduk miskin melalui Jaminan kesehatan nasional (JKN)	100%
		4	Persentase penduduk ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak	100%
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	5	Persentase desa siaga aktif	100%
		6	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan tradisional	100%
		7	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	100%
Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan lansia	5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak remaja dan lansia	8	Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	100%
		9	Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin	100%
		10	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%

		11	Pelayanan kesehatan balita	100%
		12	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
		13	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	100%
		14	Menurunkan Angka Kematian ibu melahirkan	56 per 100.000 KH
		15	Menurunkan angka kematian bayi	8 per 1000 KH
Meningkatkan status Gizi Masyarakat	Mengatasi masalah gizi di masyarakat terutama pada kelompok rentan terutama bayi, balita dan ibu hamil	16	Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk	6%
		17	Persentase balita ditimbang berat badannya di posyandu	85%
Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular seta penanggulangan wabah	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular seta penanggulangan wabah	18	Persentase desa yang mencapai universal child immunisation (UCI)	100%
		19	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%
		20	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%
		21	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
		22	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
		23	pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	100%
		24	Pelayanan kesehatan pada	100%



			usia produktif (15-59 tahun)	
Meningkatnya kesehatan lingkungan, Tempat tempat umum, kesehatan makanan dan keamanan pangan	Meningkatnya kesehatan lingkungan, Tempat tempat umum, kesehatan makanan dan keamanan pangan	25	Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	100%
		26	Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	40%

Perjanjian kinerja Tahun 2019 dinas kesehatan Kota Denpasar melaksanakan 18 Program dengan dukungan pendanaan masing - masing program:

No	PROGRAM	ANGGARAN
I.	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.853.690.817,00
II.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	24.592.155.019,00
III.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	34.345.080,00
IV.	Program pengembangan Obat asli Indonesia	228.235.750,00
V.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	888.513.875,00
VI.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	161.258.564,00
VII.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	267.824.280,00
VIII.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	28.273.387.559,00
IX.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.951.146.900,00
X.	Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	9.261.620,00

XI.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.854.400.000,00
XII.	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	120.247.556,00
XIII.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	435.825.096,00
XIV.	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	268.192.100,00
XV.	Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak	904.652.650,00

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

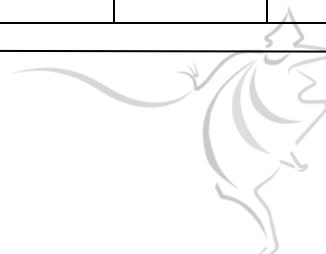
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilakukan berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 serta dokumen perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2018. Pengukuran tingkat capaian kinerja dimaksud, dilakukan dengan cara membandingkan antara Target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut digunakan skala ordinal sbb :

- a. > 90 % Sangat Tinggi (sangat berhasil)
- b. 75% s/d 90% Tinggi (berhasil)
- c. 65% s/d 75% Sedang (cukup berhasil)
- d. 50% s/d 65% Rendah (kurang Berhasil)
- e. < 50 % Sangat Rendah (tidak berhasil)

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	KINERJA
1. Meningkatkan ketersediaan, mutu dan tata kelola sumber daya kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar	1. Meningkatnya kinerja pelayanan puskesmas	1 Persentase puskesmas terakreditasi	100%	100%	100%
	2. Ketersediaan obat dan alat kesehatan di puskesmas	2 Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	100%	100%	100%
	3. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Penduduk miskin	3 Terlayannya penduduk miskin melalui Jaminan kesehatan nasional (JKN)	100%	100%	100%
		4 Persentase penduduk ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak	100%	100%	100%
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	5 Persentase desa siaga aktif	100%	100%	100%
		6 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan tradisional	100%	100%	100%
		7 Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	100%	99,8%	99,8%
Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan lansia	5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak remaja dan lansia	8 Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	100%	99,7%	99,7%
		9 Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin	100%	100,6%	100%
		10 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	98,7%	98,7%
		11 Pelayanan kesehatan balita	100%	91,8%	91,8%
		12 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	37,9%	37,9%
		13 Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	100%	100,6%	100%
		14 Menurunkan Angka Kematian ibu melahirkan	56 per 100.000 KH	12 per 100.000 KH	100%
		15 Menurunkan angka kematian bayi	8 per 1000 KH	0,6 per 1000 KH	100%



Meningkatkan status Gizi Masyarakat	Mengatasi masalah gizi di masyarakat terutama pada kelompok rentan terutama bayi, balita dan ibu hamil	16	Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk	6%	2,3%	100%
		17	Persentase balita ditimbang berat badannya di posyandu	85%	85,5%	100%
Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan wabah	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan wabah	18	Persentase desa yang mencapai universal child immunisation (UCI)	100%	100%	100%
		19	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	85,5%	85,5%
		20	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	125%	125%
		21	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	37,9%	37,9%
		22	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	15,54%	15,54%
		23	pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	100%	44,2%	44,2%
		24	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun)	100%	18,4%	18,4%
Meningkatnya kesehatan lingkungan, Tempat tempat umum, kesehatan makanan dan keamanan pangan	Meningkatnya kesehatan lingkungan, Tempat tempat umum, kesehatan makanan dan keamanan pangan	25	Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	100%	100%	1005
		26	Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	40%	40%	100%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran strategis

3.2.1 Hasil Pencapaian sasaran I Pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia kesehatan

3.2.1.1 Evaluasi dan analisis kinerja

Ada 4 indikator yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia kesehatan. Seluruh indikator pada sasaran ini sudah mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.2
Pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia kesehatan Th 2017-2018

Sasaran I. Pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia kesehatan Th 2017-2018							
NO	INDIKATOR SASARAN	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
1	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	1	1	100%	1	1	100%
4	Persentase peningkatan jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	11%	11,75%	106,8%	11%	11,75%	106,8%

Tahun 2018 dan 2019 capaian kinerja untuk sasaran stretegis Pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia kesehatan tetap dapat dipertahankan pada capaian kinerja yang baik.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah kebijakan penganggaran yang mendukung sehingga seluruh target bisa dicapai.

3.2.1.2 Evaluasi Anggaran

Sasaran Pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia kesehatan di dukung oleh 3 program yaitu Pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia kesehatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 3 kegiatan yaitu :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi Rp. 15.264.964.076,00 dari target Rp. 16.489.165.050,00 (92,6%)
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan realisasi 5.021.276.326,00 Rp. dari target 5.542.140.000,00 (90,6%)
- Pendidikan dan pelatihan formal terealisasi 236.485.577,00 dari target 237.000.000,00 (99,9%)

3.2.2 Sasaran 2 : Meningkatkan kinerja pelayanan puskesmas

3.2.2.1 Evaluasi dan analisis kinerja

Untuk mengukur keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis ini ditetapkan delapan indikator

Tabel 3.3
Meningkatkan kinerja pelayanan puskesmas Th 2018-2019

Sasaran 2. Meningkatkan kinerja pelayanan puskesmas							
NO	INDIKATOR SASARAN	2018			2019		
		TARGET	REALI SASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALI SASI	Capaian Kinerja
1	Persentase puskesmas terakreditasi	27%	27%	100%	100%	27%	100%
2	Persentase puskesmas dengan nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) bernilai baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Puskesmas berprestasi	1 Pusk	1 Pusk	100%	1 Pusk	1 Pusk	100%
4	Tenaga kesehatan teladan	7	7	100%	7	7	100%
5	Persentase tenaga dan sarana kesehatan dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	rasio dokter per 100.000 pddk	41	40,1	100%	41	38,2	98%
7	rasio bidan per 100.000 penduduk	104	98	95%	104	108,4	100%
8	rasio perawat per 100.000 penduduk	162	356	219%	162	267,6	100%

1. Persentase puskesmas terakreditasi

Tahun 2019 ditargetkan seluruh puskesmas di Kota Denpasar terakreditasi realisasinya 100% Puskesmas di Kota Denpasar telah terakreditasi di tahun 2019, capaian indikator sasaran ini tetap bisa dipertahankan 100%.

NO	NAMA PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI
1	PUSKESMAS I DENPASAR UTARA	UTAMA
2	PUSKESMAS II DENPASAR UTARA	MADYA
3	PUSKESMAS III DENPASAR UTARA	PARIPURNA
4	PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR	UTAMA
5	PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR	UTAMA
6	PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN	UTAMA
7	PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN	UTAMA
8	PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN	UTAMA
9	PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
10	PUSKESMAS I DENPASAR BARAT	MADYA
11	PUSKESMAS II DENPASAR BARAT	UTAMA

2. Persentase puskesmas dengan nilai indeks kepuasan konsumen bernilai baik

Hasil survey kepuasan konsumen di 11 Puskesmas se Kota Denpasar menunjukkan nilai survey kepuasan konsumen bernilai baik. Tahun 2018 dan 2019 capaian kinerja masih tetap bisa dipertahankan 100% (katagori sangat berhasil).

Untuk pelaksanaan survey kepuasan konsumen Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerjasama dengan Center of public health innovation (CPHI) Fakultas Kedokteran Universitas udayana.

3. Puskesmas berprestasi

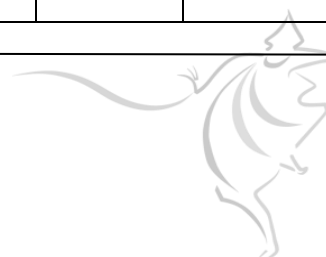
Untuk tahun 2019 Puskesmas yang maju berprestasi adalah Puskesmas I Denpasar Selatan dan memperoleh juara V di tingkat Provinsi. Tahun 2018 ditargetkan 1 puskesmas dikota Denpasar mengikuti lomba puskesmas berprestasi di tk Provinsi Bali. Capaian kinerja indikator sasaran ini sudah mencapai 100%

4. Tenaga kesehatan teladan

Pada tahun 2018 diadakan pembinaan terhadap calon tenaga kesehatan di kota Denpasar yang selanjutnya akan dipersiapkan maju mewakili Denpasar dalam tenaga kesehatan teladan tingkat tingkat Provinsi Bali.

Tenaga kesehatan yang mewakili Kota Denpasar dalam lomba tenaga teladan tingkat provinsi:

NO	NAMA	KATAGORI	PUSKESMAS	JUARA	
				TK KOTA DPS	TK PROVINSI
1	Ni Made Ratna Yanti, S.KM	Kesehatan Masyarakat	Pusk I Den Ut	I	I
2	Dr Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda, M.Kes	Dokter Umum	Pusk I Den Sel	I	I
3	Drg. Ni Made Ardani	Dokter Gigi	Puskesmas II Denp Bar		I
4	Ni Wayan Luh Sri Wahyuni, AMd.Keb	Bidan	Pusk II Den Ut	I	4
5	Ni Luh Putu Kusumawathi, A.Md	ATLM	Pusk IV Den Sel	I	I



6	Ni Nyoman Purwandani, A Md. Kl	Kesling	Pusk II Den Sel	I	8
7	Ni Nyoman Sumiari	Perawat	Pusk II Den Ut	I	I
8	Irma Dwi Cahyanti Putri, AMd. Gizi	Gizi	Pusk I den sel	I	

Capaian kinerja indikator sasaran ini sebesar 100% karena dari 8 jenis tenaga yang ditargetkan untuk ikut tenaga kesehatan teladan semuanya terpenuhi dan 5 orang tenaga kesehatan yaitu tenaga kesehatan masyarakat dan farmasi mendapat juara I di tk Provinsi Bali.

5. Persentase tenaga dan sarana kesehatan dibina

Indikator ini ditargetkan 100% dan sudah tercapai

6. Rasio dokter per 100.000 penduduk

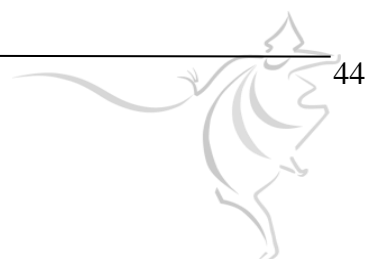
Rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Denpasar ditargetkan sebesar 41 per 100.000 penduduk dengan realisasi 38,2 per 100.000 penduduk. Untuk tahun 2019 data dokter yang tercatat adalah dokter yang bekerja di Puskesmas dan RS baik Pemerintah maupun swasta di Kota Denpasar, tidak termasuk dokter yang bekerja di klinik.

7. Rasio perawat per 100.000 penduduk

Rasio perawat per 100.000 penduduk di Kota Denpasar ditargetkan sebesar 162 per 100.000 penduduk realisasi 267,6 sehingga kinerja indikator ini sudah lebih dari 100%. Tingginya rasio perawat di Kota Denpasar disebabkan karena di Kota Denpasar terdapat 21 buah RS swasta. Data ini belum termasuk perawat yang bekerja di klinik di wilayah Kota Denpasar

8. Rasio bidan per 100.000 penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Denpasar ditargetkan sebesar 104 per 100.000 penduduk realisasi 109,4 per 100.000 penduduk (capaian kinerja 100%). Walaupun kinerja ini sudah baik namun kedepannya tetap perlu pendataan yang lebih baik karena data ini belum termasuk bidan praktek mandiri dan bidan yang bertugas di klinik kesehatan



Faktor pendukung keberhasilan sasaran Meningkatkan kinerja pelayanan puskesmas adalah

1. Tersedianya pendanaan yang cukup, baik dari APBD maupun bantuan pemerintah Pusat dalam bentuk dana DAK untuk akreditasi puskesmas
2. Terjalannya Koordinasi yang baik dengan lintas program dan lintas sektor

3.2.2.2 Evaluasi anggaran

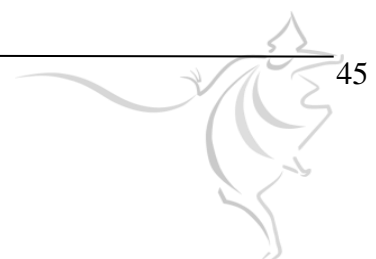
Meningkatkan kinerja pelayanan puskesmas didukung 1 program yaitu Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan 2 kegiatan yaitu:

- Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan untuk tahun 2019 dianggarkan Rp. 1.590.205.040,00 dengan realisasi 1.133.078.211,00 (71,25%)
- Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan untuk kegiatan ini ditargetkan anggaran Rp. 360.743.000,00 dengan realisasi Rp. 294.186.400,00 (81,5%).

3.2.3 **Sasaran 3: Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas.**

3.2.3.1 Evaluasi dan analisis kinerja

Untuk sasaran strategis ini ditetapkan 3 indikator yaitu 1) persentase ketersediaan obat di puskesmas dengan kinerja 100%, 2) Persentase penggunaan obat rasional (POR) di puskesmas dengan capaian kinerja 100% dan 3)Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dengan capaian kinerja 100%.



Tabel 3.4
 Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas
 Th. 2018-2019

Sasaran 3. Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas							
NO	INDIKATOR SASARAN	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	Capaian kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian kinerja
1	Persentase ketersediaan obat di puskesmas	93%	93.71%	100%	93%	100%	100%
2	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terpenuhinya kebutuhan alat - alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan capaian indikator sasaran ini sudah berkinerja baik (100%), dan tetap bisa dipertahankan selama tahun 2018 dan 2019

Faktor pendukung keberhasilan sasaran ini adalah

1. Tersedianya pendanaan yang cukup, baik dari APBD maupun bantuan pemerintah Pusat dalam bentuk dana DAK untuk pengadaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.
2. Monitoring dan evaluasi rutin ke puskesmas tentang pentingnya penggunaan obat rasional

3.2.3.2 Evaluasi anggaran

Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas didukung Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang didukung dua kegiatan yaitu Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan target Rp. 4.456.480.678,00 realisasi Rp. 3.198.512.782,00 (71,8%) dan kegiatan Peningkatan pemerataan obat dan Perbekalan Kesehatan dengan target Rp. 686.634.287,00 realisasi Rp. 678.628.810,00 (98,8%)

3.2.4 Meningkatnya Pelayanan kesehatan penduduk miskin

3.2.4.1 Evaluasi dan analisis kinerja

Ada 4 indikator pada sasaran Meningkatnya Pelayanan kesehatan penduduk miskin yaitu:

Tabel 3.5
Meningkatnya Pelayanan kesehatan penduduk miskin Th. 2018-2019

Sasaran 4. Meningkatnya Pelayanan kesehatan penduduk miskin							
NO	INDIKATOR SASARAN	2018			2019		
		TARGET	REALI SASI	Capaian kinerja	TARGET	REALI SASI	Capaian kinerja
1	Terlayannya penduduk miskin melalui JKBM dan JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase peserta BPJS yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	85%	95,51 %	112%	100%	93,7%	93,7%
4	Persentase penduduk yang ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tahun 2019 dari empat indikator yang mendukung sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan pada penduduk miskin seluruh indikator pencapaiannya sudah diatas 90%.

a. Terlayannya penduduk miskin melalui JKN.

Seluruh penduduk miskin di Kota Denpasar sudah terlindungi JKN, Penduduk miskin di Kota Denpasar yang berjumlah 122.515 seluruhnya sudah dilindungi oleh sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui mekanisme sebagai penerima bantuan iuran APBN dan APBD. Sebanyak 53.707 orang merupakan penerima bantuan iuran dari dana APBN dan 68.328 orang merupakan penerima bantuan iuran dari dana APBD.

b. Persentase peserta bpjs yang terlayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas).

Indikator ini ditargetkan 100%, capaian tahun 2019 adalah sebesar 100%, seluruh pasien BPJS yang berkunjung ke Puskesmas



sudah mendapatkan penanganan sesuai standar, sehingga kinerja untuk indikator ini adalah 100% (sangat baik).

c. Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Tahun 2019 ditargetkan 100% penduduk Denpasar sudah terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional. Data peserta JKN tahun 2019 sebanyak 607.054 orang (95,51% dari seluruh penduduk kota Denpasar yang ber KTP Denpasar) yang terdiri dari Penerima bantuan iuran (PBI) APBN sebanyak 53.707 orang, PBI APBD sebanyak 68.808 orang. Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 296.991 orang, Pekerja bukan penerima upah sebanyak 163.554 orang dan bukan pekerja (BP) sebanyak 23.99425.150 orang. Untuk kepesertaan JKN jumlah penduduk kota Denpasar yang dipakai dasar adalah penduduk yang bersumber dari data kependudukan dan catatan sipil yang berjumlah 647.981 (Penduduk ber KTP Denpasar). Sehingga jumlah penduduk yang terlindungi JKN sebanyak 93,7%. Kepesertaan JKN di Kota Denpasar tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bali. Perlu usaha yang lebih keras untuk meningkatkan kepesertaan JKN karena pemerintah secara Nasional menargetkan 100% penduduk terlindung JKN di tahun 2019, untuk meningkatkan kepesertaan JKN maka pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan perlu meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya JKN sehingga masyarakat yang termasuk golongan mampu akan ikut JKN secara mandiri. Untuk meningkatkan cakupan JKN maka pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan perlu meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya JKN sehingga masyarakat yang termasuk golongan mampu akan ikut JKN secara mandiri.

d. Persentase penduduk yang ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak

Capaian kinerja ini sudah mencapai 100%, seluruh penduduk yang ditemukan katarak dan memenuhi syarat sudah dilakukan operasi katarak.

Faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah:

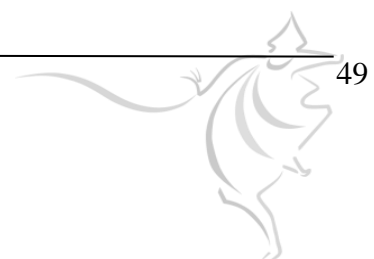
- Adanya dukungan kebijakan anggaran yang cukup untuk menjamin kesehatan penduduk miskin di wilayah kota Denpasar
- Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kepesertaan JKN baik ditingkat nasional maupun daerah

Adanya kemudahan masyarakat untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer

3.2.4.2 Evaluasi anggaran

Sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di dukung oleh program Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan:

- Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Pusk dan jaringannya ditargetkan Rp. 21.056.262.151,00 terealisasi Rp.18.988.490.155,00 (90,2%) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya realisasi Keuangannya sebesar 90,2 % karena jumlah yang dianggarkan tidak sesuai dengan jumlah kuota pasien miskin di Kota Denpasar, sehingga ada sisa anggaran.
- Pelayanan Operasi Katarak ditergetkan Rp. 9.261.620,00 terealisasi 9.261.620,00 (100%)
- Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditargetkan Rp. 9.954.478.110,00 terealisasi sebesar 7.057.602.247,00 (70,9 %) rendahnya realisasi keuangan karena beberapa jenis barang yang direncanakan untuk diadakan tidak terdaftar di E Katalog



3.2.5 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan

3.2.5.1 Evaluasi dan analisis kinerja

Tabel 3.6
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan Tahun 2018-2019

Sasaran 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan							
NO	INDIKATOR SASARAN	2018			2019		
		TARGET	REALI SASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALI SASI	Capaian Kinerja
1	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80%	83.57 %	104%	100%	83%	104%
2	Persentase desa siaga aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase posyandu aktif	81%	60.43 %	74,6%	82%	60.2 %	74,6%
4	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	rasio posyandu per 1000 balita	11	5.93	53,9%	11	5.93	53,9%
6	Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat	65%	65%	100%	65%	65%	100%
7	Persentase Desa/Kel dengan TOGA memenuhi syarat	80%	80%	100%	80%	80%	100%

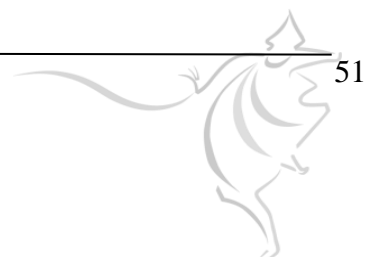
Dari tujuh indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, sebagian besar sudah mencapai target dan capaian kinerjanya bisa dipertahankan dari 2018-2019 namun capaian indikator rasio posyandu per 1000 balita masih rendah. Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat untuk ke posyandu dan peningkatan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan masyarakat desa

a. Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

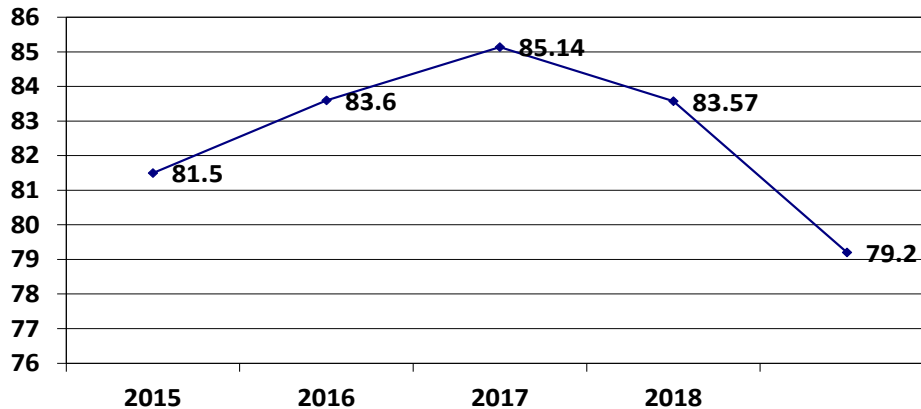
Untuk menanggulangi rumah tangga yang rawan terhadap penyakit infeksi dan non infeksi, maka setiap rumah tangga yang ada perlu diberdayakan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Untuk mencapai rumah tangga ber PHBS, terdapat 10 perilaku hidup bersih dan sehat yang dipantau, yaitu:

1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
2. Memberi ASI eksklusif
3. Menimbang balita setiap bulan
4. Menggunakan air bersih
5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
6. Menggunakan jamban sehat
7. Memberantas jentik di rumah seminggu sekali
8. Makan buah dan sayur setiap hari
9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari
10. Tidak merokok di dalam rumah

Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada rumah tangga di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.1
Persentase Rumah Tangga ber PHBS di Kota Denpasar
Tahun 2015 s/d 2019



Sumber : Bidang Kesmas Dikes Kota Denpasar

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun persentase rumah tangga yang ber PHBS cenderung mengalami sedikit penurunan namun dengan kinerja yang masih baik (90%). Untuk tahun selanjutnya perlu terus digalakkan upaya untuk meningkatkan cakupan rumah tangga ber PHBS dengan meningkatkan pembinaan PHBS di rumah tangga dengan menggerakkan dan memberdayakan keluarga atau anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan sehat melalui penyuluhan baik secara individu maupun berkelompok agar setiap orang, kelompok atau keluarga tahu, mau dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan.

Capaian RT ber PHBS Kota Denpasar sudah lebih baik bila dibandingkan dengan capaian capaian provinsi Bali (74,58).

b. Persentase desa siaga aktif

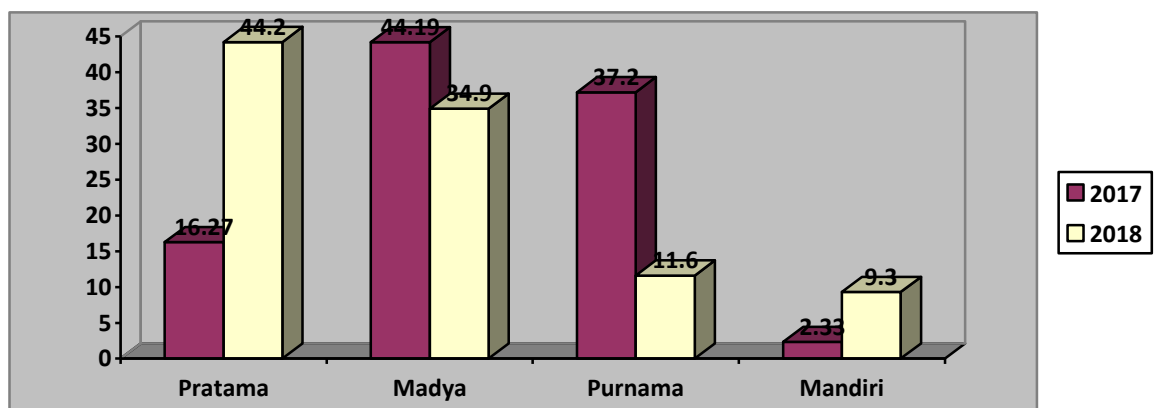
Desa/kelurahan siaga aktif adalah Desa/kelurahan yang memiliki poskesdes atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana



dan kegawatdaruratan, surveylans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), Penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Kemenkes RI, 2015).

Dari 43 desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar seluruhnya sudah merupakan desa siaga aktif, dengan katagori Desa siaga tergolong pratama sebesar 44,2%, madya 34,9%, purnama 11,6% dan mandiri sebesar 9,3%.

Gambar 3.2
PERSENTASE DESA SIAGA AKTIF BERDASARKAN STRATA
DI KOTA DENPASAR TAHUN 2017 DAN 2018



Sumber: seksi promkes bidang bina kesmas dikes kota Denpasar

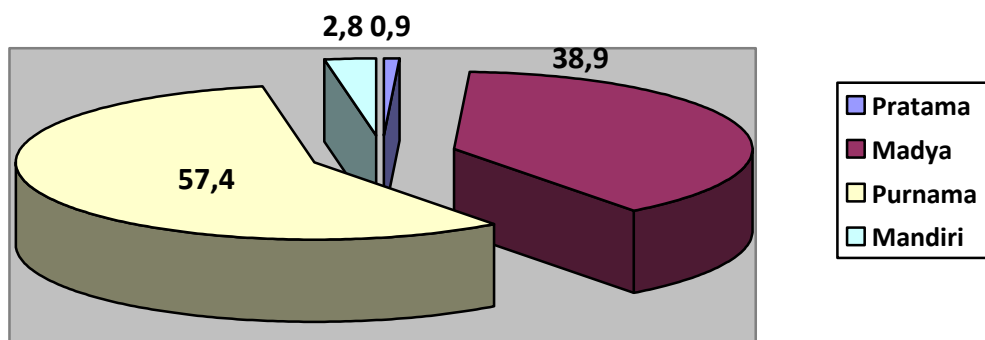
Grafik diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 sudah terjadi peningkatan katagori desa siaga Mandiri di Kota Denpasar walaupun untuk katagori madya dan purnama mengalami penurunan.

c. Persentase posyandu aktif

Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Keberadaan posyandu sampai saat ini masih memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada golongan balita. Posyandu memiliki lima program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan

penanggulangan diare. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat. Ratio posyandu dengan balita di kota denpasar adalah 1 posyandu melayani 100 balita. Tahun 2019 ditargetkan 81% persen posyandu aktif namun capaiannya baru 60,2% (kinerja =80%)

Gambar 3.3
PERSENTASE POSYANDU BERDASARKAN STRATA
DI KOTA DENPASAR TAHUN 2019



Su

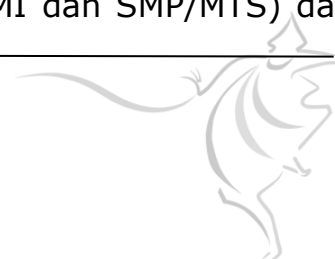
Sumber: Bidang kesmas dikes Kota Denpasar

Pada gambar diatas terlihat bahwa proporsi tertinggi adalah posyandu purnama dan proporsi terendah adalah posyandu mandiri dan pratama.

Lambatnya perkembangan posyandu ke arah posyandu mandiri tidak terlepas dari kurang berperan sertanya masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan posyandu terutama dalam hal dukungan dana untuk operasional kegiatan posyandu. Saat ini dana operasional posyandu sebagian besar masih berasal dari bantuan pemerintah. Kedepannya perlu upaya intensif untuk meningkatkan jumlah posyandu mandiri

d. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di



luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi: a) Penilaian status gizi. b) Penilaian tanda vital. c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut. d) Penilaian ketajaman indera.

Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan b) Melakukan rujukan jika diperlukan c) Memberikan penyuluhan kesehatan

Untuk tahun 2019 persentase siswa pendidikan dasar yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 96,8%, mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan tahun 2018 (99,7%). SPM menargetkan anak pada usia pendidikan dasar 100% harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pada tahun 2019 target ini belum tercapai sehingga perlu usaha yang lebih maksimal dan untuk memenuhi target dimaksud

e. rasio posyandu per 1000 balita

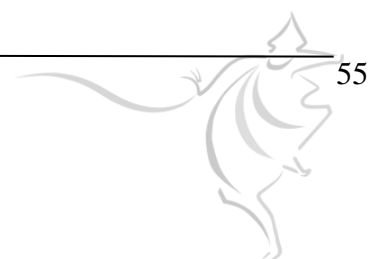
Indikator rasio posyandu per 1000 balita juga merupakan salah satu indikator kunci pada laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD). Capaian indikator rasio posyandu per 1000 balita masih rendah. kedepannya perlu peningkatan kerjasama lintas sektor untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat terutama Posyandu. Upaya promosi kesehatan juga perlu terus digiatkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat ke posyandu

f. Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini adalah pembinaan kepada pengobat tradisional yang ada di Kota Denpasar. Tahun 2019 di targetkan 65% pengobat tradisional memenuhi syarat kesehatan dan capaiannya sudah 65% sehingga kinerja indikator ini 100%

g. Persentase Desa/Kel dengan TOGA memenuhi syarat

Capaian indikator ini sudah 100%, dari 43 desa/kel yang ada di Kota Denpasar seluruhnya sudah memiliki toga yang memenuhi syarat. Faktor pendukung pencapaian sasaran ini :



- Semakin meningkatnya peran serta masyarakat
- Terjalinya kerjasama lintas sektor

Tersedianya anggaran yang cukup untuk upaya promosi kesehatan kepada masyarakat

3.2.5.2 Evaluasi anggaran

Pencapaian sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, didukung oleh dua program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Program pengembangan Obat asli Indonesia.

Program Promosi Kesehatan terdiri dari dua kegiatan

- Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dianggarkan dana Rp. 358.981.000,00 realisasi Rp. 326.782.400,00 (91%)
- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat ditargetkan 471.876.875,00 realisasi Rp. 444.243.000,00 (94,1%)

Sedangkan Program pengembangan Obat asli Indonesia

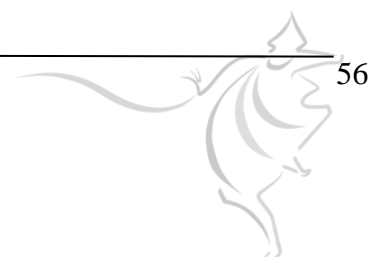
- Peningkatan promosi obat bahan Indonesia di dalam dan luar negeri ditargetkan 193.960.435,00 realisasi 174.588.230,00 (90%)
- Monitoring Evaluasi ditargetkan 34.275.315,00 realisasi 21.075.315,00 (61,5%). Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan realisasi fisik 100% sedangkan keuangan 65% karena sisa uang monev lapangan dilaksanakan secara simultan dan efisiensi perjalanan Dinas

3.2.6 **Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak remaja dan lansia**

Dari 25 indikator yang mendukung sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak remaja dan lansia 26 indikator kinerjanya sudah tergolong baik hanya 1 indikator yang capaiannya sangat rendah yaitu pelayanan kesehatan usia lanjut

3.2.6.1 Evaluasi dan analisis kinerja

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak remaja dan lansia Tahun 2018-2019



Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak remaja dan lansia							
No	Indikator	2018		Capaian kinerja	2019		Capaian kinerja
		target	realisasi		target	realisasi	
1	Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K1	100%	101.5%	101%	100%	100,6%	101%
3	Persentase puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	100%	100.30%	100%	100%	99,7%	99,7%
5	Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin	100%	100%	100%	100%	100,6%	100%
6	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi tertangani	80%	85%	106%	80%	82,2%	100%
7	persentase persalinan di fasilitas kesehatan	100%	101.90%	101%	100%	100,6%	100%
8	Cakupan pelayanan ibu nifas (KF1)	99%	101.90%	102%	99%	100,6%	100%
9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	102.30%	102%	100%	100,6%	100%
10	Cakupan pelayanan ibu nifas Ke 3 (KF3)	98%	99.90%	101%	98%	99.3%	100%
11	Menurunkan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 KH	56	24	100%	56	12%	100%
12	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

13	Persentase bayi dengan BBLR	<5%	1%	100%	<5%	1,4%	100%
14	Cakupan kunjungan neonatus pertama kali (KN1)	100%	99.5%	99,5%	100%	100%	100%
15	Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3)	98%	100.2%	102%	98%	98,7%	100%
16	Cakupan Neonatal dengan komplikasi ditangani	80%	74.50%	93,2	80%	74.7%	93%
17	Menurunkan angka kematian neonatus per 1000 KH	10	0.60%	100%	10	0.60%	100%
18	Cakupan pelayanan bayi	93%	97.00%	104%	93%	98,7%	104%
19	Menurunkan angka kematian bayi per 1000 KH	10	0,7	100%	10	0,6	100%
20	Persentase KB Aktif	70%	71.20%	101%	70%	76,2%	100%
21	Pelayanan kesehatan balita	100%	93.30%	93%	100%	96%	96%
22	persentase anak balita di SDIDTK (Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang)	93%	93.00%	100%	93%	93.00%	100%
23	Menurunkan angka kematian Balita per 1000 KH	10	0,8	100%	10	0	100%
24	Persentase puskesmas santun lansia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	33.60%	33,6%	100%	37,9%	37,9%

Ada dua puluh lima indikator yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu bagi ibu, bayi, anak, remaja dan lansia. Dua puluh enam indikator pada sasaran strategis ini sudah berhasil dengan

baik (capaiannya kinerjanya diatas 90%), hanya 1 indikator yang belum mencapai target yaitu pelayanan kesehatan pada usia lanjut.

a. Persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil target indikator kinerja ini sebesar 100%, dari 11 puskesmas yang ada seluruhnya sudah melaksanakan kelas ibu hamil sehingga capaian kinerjanya sudah 100%

b. Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K1

Cakupan K1 menggambarkan besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Indikator ini ditargetkan 100% dan sudah tercapai sehingga kinerjanya 100%

c. Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal) sesuai standar (K4) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil oleh petugas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, tekanan darah, nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas), tinggi fundus uteri, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ), skrining status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, test laboratorium (rutin dan khusus), tatalaksana kasus, serta temu wicara (konseling), termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), serta KB Pasca persalinan.

Pelayanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar yang ditetapkan. Ditetapkan pula bahwa distribusi frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan yang dianjurkan yaitu: minimal 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada triwulan kedua dan 2 kali pada triwulan ketiga. Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk

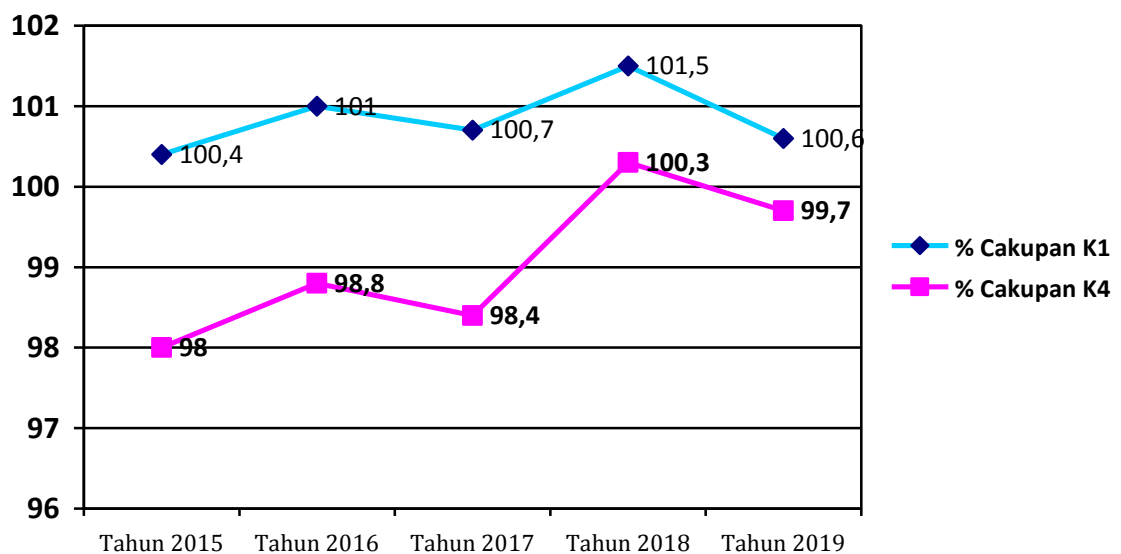


menjamin perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan komplikasi.

Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) adalah persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali kunjungan yaitu sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Indikator ini ditargetkan sebesar 100%. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil.

Gambar dibawah ini memperlihatkan cakupan kunjungan K1 dan K4 pada ibu hamil selama lima tahun terakhir :

Gambar 3.4
Cakupan K1 dan K4 Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019



Sumber: Bidang Kesmas Dikes Kota Denpasar

Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 menunjukkan angka drop out K1-K4, dengan kata lain jika kesenjangan K1 dan K4 kecil maka hampir semua ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal meneruskan hingga kunjungan keempat pada triwulan 3, sehingga kehamilannya dapat terus dipantau oleh petugas kesehatan. Pada tahun 2019

kesenjangan antara K1 dan K4 sebesar sebesar 0,9% hal ini berarti terdapat 0,9% ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan K1 pada trimester I, namun tidak melakukan pemeriksaan sampai K4.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar menargetkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100% sesuai dengan target SPM berdasarkan PMK No. 4 tahun 2019. Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Denpasar Tahun 2019 sebesar 99,7%. Kedepannya tetap perlu dilaksanakan upaya yang lebih maksimal dalam menemukan ibu hamil dan melaksanakan pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan bekerja sama dengan Bidan praktek swasta, dokter praktek swasta dan klinik diwilayah kerjanya. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap pemeriksaan kehamilan K4 adalah tingkat pendidikan, jenis pekerjaan ibu, dan tingkat sosial ekonomi (Dep Kes, 2009).

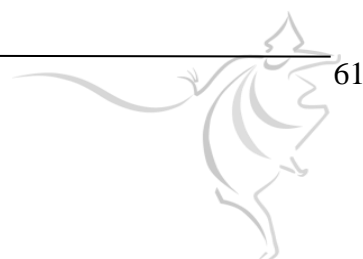
d. Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K),

Seluruh puskesmas sudah melaksanakan P4K sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100%

e. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin

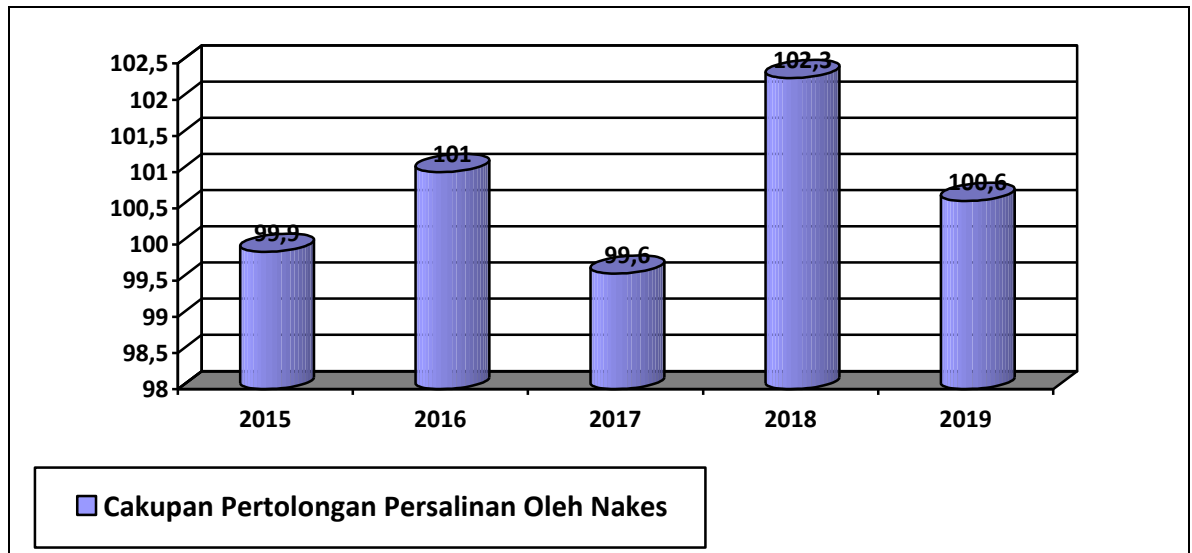
Untuk menurunkan kejadian kematian ibu dan kematian bayi salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kandungan (SpOG), dokter umum dan bidan serta diupayakan dilakukan di fasilitas kesehatan. Keberhasilan upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan PN).

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter dan dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat tanda register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Dari 16.405 sasaran ibu bersalin yang ada di Kota Denpasar 16.501 orang sudah mendapatkan



pelayanan persalinan sesuai standar. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100%

Gambar 3.5
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Di Kota Denpasar Tahun 2015 s/d 2019



Sumber: Bidang Kesmas Dikes Kota Denpasar

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2019 telah mencapai 100,6, Bila dibandingkan dengan target renstra persalinan oleh nakes tahun 2019 sebesar 100% maka pencapaian cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan lebih dari 100% karena pembagiannya menggunakan data sasaran yg ditetapkan oleh pusdatin kemkes. Pusdatin kemkes menetapkan sasaran ibu bersalin di Kota Denpasar tahun 2019 sebanyak 16.405 orang. Sebanyak 16.501 orang sudah melaksanakan persalinan di fasilitas kesehatan (100,6%).

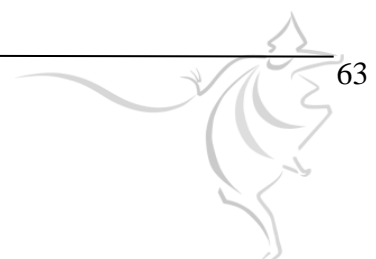
f. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Tahun 2019 seluruh persalinan sudah ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, sehingga capaian kinerja 100%

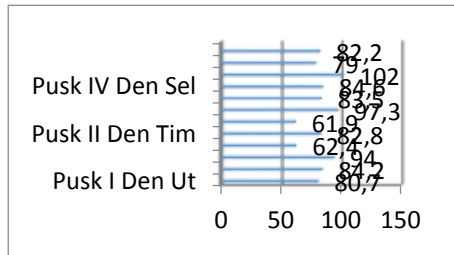
g. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi tertangani

Komplikasi kebidanan adalah keadaan penyimpangan dari normal, yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Komplikasi kebidanan antara lain ketuban pecah dini, perdarahan per vagina, hipertensi dalam kehamilan (sistole > 140 mm Hg, diastole > 90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan premature, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju), dan infeksi masa nifas (Depkes, 2010).

Jumlah sasaran bumil risti/ komplikasi dihitung berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK 02.02/Menkes/117/2015 tentang data penduduk sasaran pembangunan kesehatan tahun 2015-2019. Jumlah ibu hamil dengan komplikasi diprediksi sebesar 20% dari seluruh sasaran ibu hamil. Jumlah seluruh ibu hamil di Kota Denpasar tahun 2019 sebesar 17.187 orang, sehingga jumlah bumil risti/komplikasinya diprediksi sebesar 3.437 orang. Selama periode tahun 2019 ditemukan ibu hamil dengan komplikasi sebesar 2.827 orang dan seluruhnya sudah ditangani. Hasil penanganan ibu hamil dengan komplikasi ini dibandingkan dengan target maka pencapaian Kota di Denpasar baru sebesar 82%. Pencapaian ini sudah mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2018 (85%). Renstra Dikes Kota Denpasar 2016-2021 menetapkan 80% ibu hamil dengan risti/komplikasi di tahun 2019 harus tertangani. Kinerja untuk indikator ini sudah baik (100%)



Gambar 3.5
Cakupan penanganan komplikasi kebidanan menurut Puskesmas
Di Kota Denpasar Tahun 2019



Sumber: Bidang Kesmas Dikes Kota Denpasar

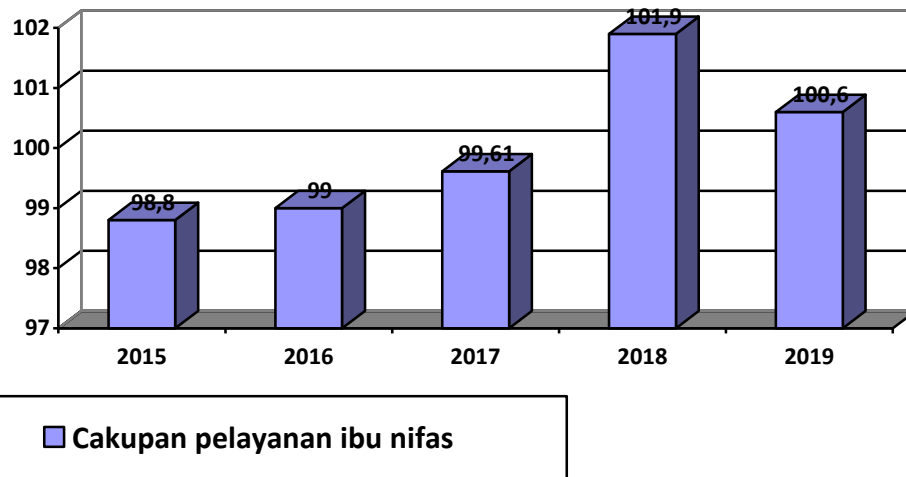
Kedepannya perlu ditingkatkan upaya penemuan dini ibu hamil risti/komplikasi oleh Puskesmas melalui system surveilans aktif dan peningkatan kerjasama dengan jejaring puskesmas seperti klinik maupun bidan praktek swasta.

h. Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kunjungan nifas didefinisikan sebagai kontak ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung fasilitas kesehatan (termasuk bidan di desa/ polindes/ poskesdes) dan kunjungan rumah. Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan tinggi fundus uteri; 3) pemeriksaan lochia dan pengeluaran pervagina lainnya; 4) pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Eksklusif 6 bulan; 5) pemberian kapsul

vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali; dan 6) pelayanan KB pasca persalinan

Gambar 3.6
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Denpasar
Tahun 2015 sampai dengan 2019



Sumber: Bidang Kesmas Dikes Kota Denpasar

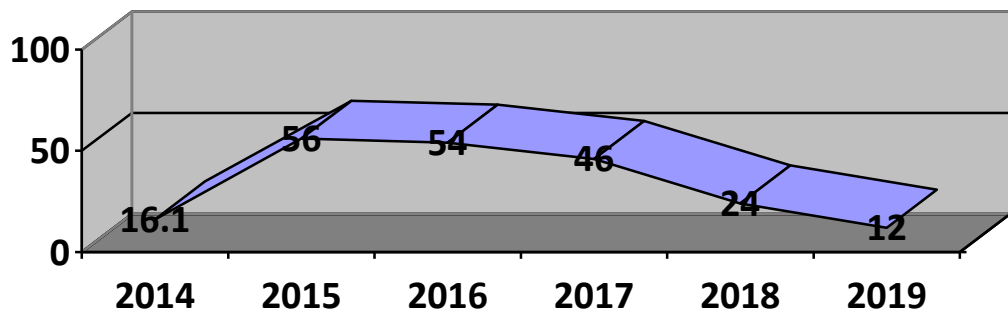
Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (cakupan Kf-3). Indikator ini menilai kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

Cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 2019 adalah sebesar 100,6% sedikit menurun bila dibandingkan tahun 2018 (101,90%). Sementara target cakupan kunjungan ibu nifas berdasarkan target Renstra 2016-2021 adalah 98%. Jadi capaian pelayanan ibu nifas Kota Denpasar sudah melampaui target yang ditetapkan dan kinerja pelayanan untuk indikator ini termasuk kategori baik.

i. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, dan pelayanan kesehatan waktu melahirkan.

Grafik 3.7
AKI Kota Denpasar Tahun 2015-2019



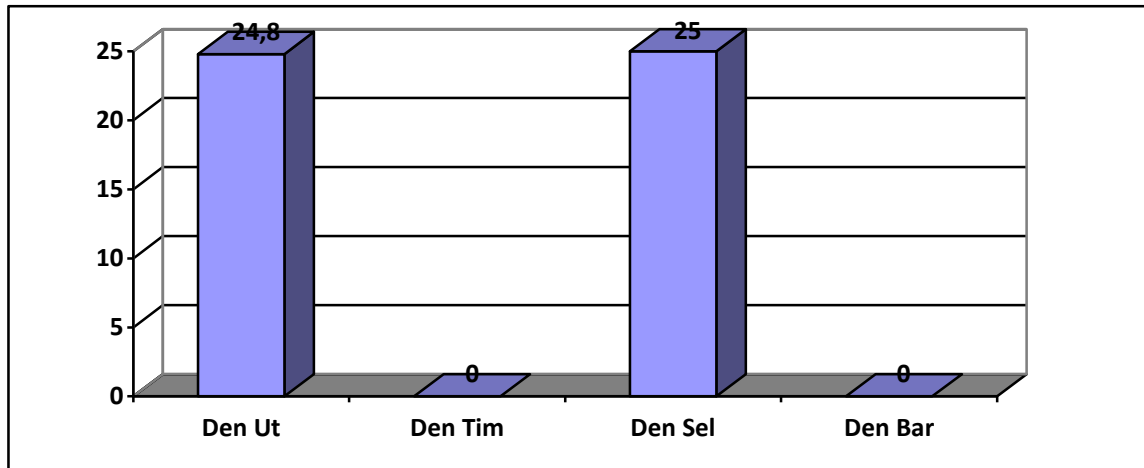
Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Dps

Pada grafik diatas terlihat dalam tiga tahun terakhir angka kematian ibu di Kota Denpasar sudah dapat ditekan. Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2019 (12 per 100.000 KH) lebih rendah bila dibandingkan tahun 2018 (24 per 100.000 KH) dan sudah lebih rendah dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2018 (56 per 100.000 KH). Jika dibandingkan dengan target Nasional (125 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan, demikian pula jika dibandingkan dengan AKI provinsi Bali tahun 2018 sebesar 54,03/100.000 KH.

Selama tahun 2019 di Kota Denpasar terjadi 2 kematian ibu dari 16.538 Kelahiran hidup yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 1 orang ibu nifas. Kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh karena Perdarahan 1 orang, dan 1 orang karena sebab lainnya.

Di Tingkat Kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Angka Kematian Ibu terdistribusi di 4 kecamatan seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 3.8
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH berdasarkan Kecamatan
di Kota Denpasar Tahun 2019



Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Data pada grafik 4.6 di atas menunjukkan bahwa kematian maternal tertinggi di kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Utara. Sedangkan Denpasar timur dan Denpasar Barat tahun 2019 tidak ada kematian ibu. Bila dilihat kelompok umurnya, pada tahun 2019 kematian ibu terjadi pada kelompok umur 20-34 tahun yaitu sebanyak 2 orang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kelompok umur 20-34 tahun merupakan kelompok umur yang paling produktif untuk hamil dan melahirkan.

Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di tekan.

Kedepannya perlu terus digalakkan upaya-upaya untuk menekan kematian ibu di Kota Denpasar dengan meningkatkan PWS ibu,

meningkatkan surveilans terhadap ibu hamil dan peningkatan cakupan penanganan ibu dengan komplikasi.

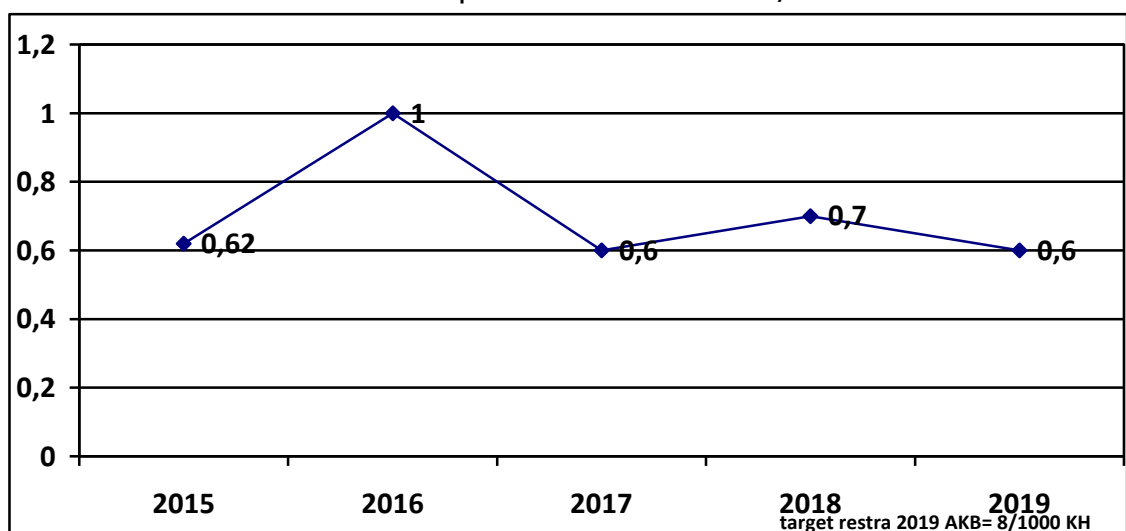
j. Angka Kematian Bayi

Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu daerah disebut Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.9
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup
Di Kota Denpasar Tahun 2015 s/d 2019

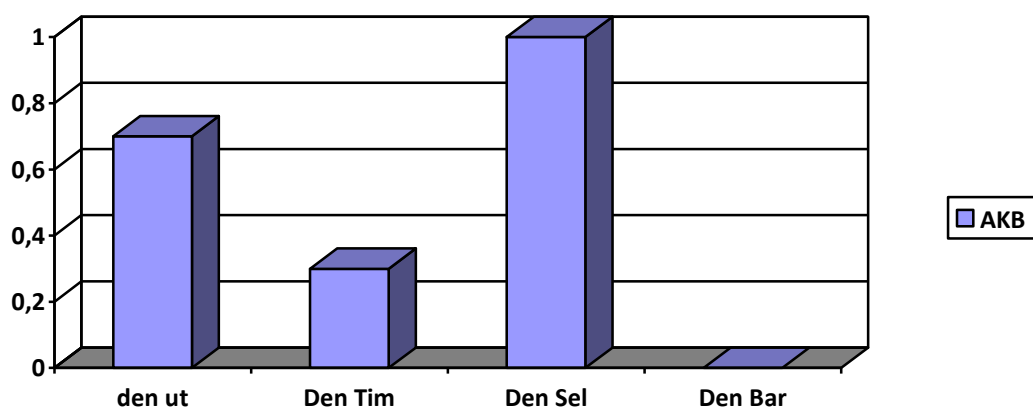


Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Dps

Data pada grafik 4.1 di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, namun masih dibawah target yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016-2021. Hal ini tidak terlepas dari pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya, meningkatnya pendapatan masyarakat serta perbaikan gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit.

AKB di tingkat Kecamatan tahun 2019 seperti pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.10
Angka Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Kelamin
Di Kota Denpasar Tahun 2019



Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Dps

Gambar diatas menunjukkan pada tahun 2019 angka kematian bayi pada tahun 2019 tertinggi di Kecamatan Denpasar Selatan, sedangkan terendah di kecamatan Denpasar Barat.

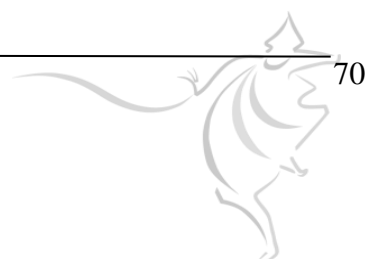
Kematian Bayi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencantumkan target kematian bayi pada tahun 2019 sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar (0.7/1000 Kelahiran Hidup) capaian ini sudah dibawah target dan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik karena petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar.

Penyebab Kematian bayi tersebut adalah

No	Penyebab Kematian	Jumlah
1	Berat badan lahir rendah (BBLR)	5
2	Asfiksia	2
3	Sepsis	1
4	Kelainan bawaan	2
5	Pneumonia	0
6	Lain -lain	0
	TOTAL	10

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi terbagi dalam beberapa upaya antara lain: 1) Untuk mencegah kematian bayi akibat infeksi maka upaya yang dilakukan adalah imunisasi TT pada ibu hamil, persalinan yang bersih, perawatan mata, ASI dini dan eksklusif serta pemberian antibiotika 2) untuk penyebab kematian karena asfiksia dan trauma kelahiran dilakukan upaya berupa resusitasi dan penghangatan. 3) untuk mencegah kematian bayi karena kelainan kongenital dilakukan upaya yang meliputi terapi spilis bagi WUS penderita spilis dan suplementasi Folat pada ibu hamil serta peningkatan KIE pada ibu hamil.



k. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Bayi lahir hidup dikota Denpasar tahun 2019 sebanyak 16.538 orang seluruhnya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100%. Salah satu pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir adalah timbang berat badan. Tahun 2019 ditargetkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dengan berat badan <2500 gram sebanyak kurang dari 5% dari seluruh bayi baru lahir, capaiannya sebesar 1,4% bayi ditemukan BBLR sehingga capaian kinerja ini > 100%. Kesehatan ibu saat hamil berperan penting dalam kesehatan bayi dalam kandungan termasuk berat badannya.

l. Cakupan kunjungan neonatus

Dalam perjanjian kinerja diperjanjikan kunjungan neonatus pertama (KN1) sebanyak 100% dan kinerja ini capaiannya 100% sedangkan kunjungan neonatus ketiga (KN3) ditargetkan sebanyak 98% dengan realisasi sebesar 98,7% sehingga kinerjanya juga sudah baik.

m. Cakupan pelayanan kesehatan bayi

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (Dokter, Bidan, dan Perawat) minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio1-4, dan campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang penilaian terhadap upaya peningkatan akses bayi memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar pada tahun 2019 sebesar 98,7% mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun



2018 sebesar 97%. Target pelayanan kesehatan bayi pada renstra Kota Denpasar untuk tahun 2019 adalah 100%, dengan capaian pelayanan bayi sebesar 98,7% di tahun 2019 maka target cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar belum terpenuhi, kedepannya perlu kerja keras semua pihak dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar.

Terpenuhinya target cakupan kunjungan bayi sangat dipengaruhi oleh keaktifan posyandu tiap bulannya, peran kader dan partisipasi keluarga untuk membawa bayi ke posyandu serta keaktifan tenaga puskesmas dalam membina posyandu.

n. Pelayanan kesehatan balita

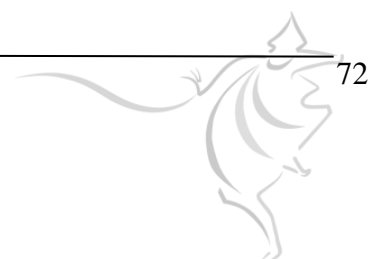
Tahun 2019 diperjanjikan pelayanan kesehatan balita sebesar 100% capaian kota Denpasar 90%, sehingga kinerjanya belum mencapai 100% walaupun sudah termasuk katagori baik. Kedepannya perlu ditingkatkan partisipasi balita datang ke posyandu dan meningkatkan koordinasi pelaporan dari jejaring puskesmas sehingga balita yang dilayani di klinik maupun dokter praktek swasta dapat terpantau.

o. Persentase anak balita di SDIDTK

Pemeriksaan Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang Anak balita perlu dilaksanakan untuk mengetahui secara dini kelainan tumbuh kembang yang diderita anak balita dan secepatnya dapat dilakukan intervensinya. Tahun 2019 ditargetkan 93% Balita di SDIDTK dan hasilnya 93%. Capaian kinerja ini sudah baik (100%). Kedepannya perlu usaha lebih maksimal sehingga target bisa tercapai secara maksimal

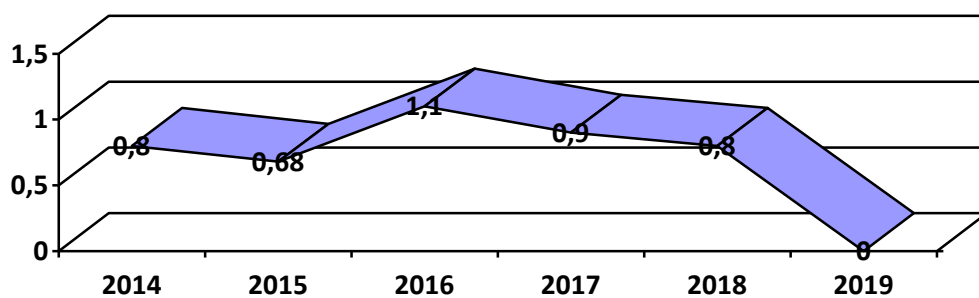
p. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dan dinyatakan per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita dihitung dengan menjumlahkan kematian bayi dengan kematian balita. AKABA



menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak-anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Denpasar selama 5 tahun terakhir seperti pada grafik di bawah ini

Gambar 3.11
Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 KH
Di Kota Denpasar Tahun 2014 s.d 2019



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar Tahun 2019

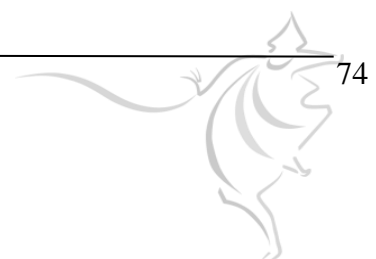
Secara Nasional ditetapkan AKABA sebesar 40/1000 KH. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2016-2021 menetapkan target AKABA Kota Denpasar sebesar 10/1000 KH. Pada tahun 2018 terdapat 13 kematian balita (12 kematian bayi dan 1 kematian anak balita). Angka kematian balita di Kota Denpasar tergolong rendah (<20). Rendahnya angka kematian balita (AKABA) di Kota Denpasar disebabkan karena baiknya gizi balita, rendahnya faktor risiko yang mengakibatkan kematian bagi balita, perilaku orang tua dalam pemberian gizi anak cukup baik serta peranan dari petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Capaian indicator kematian balita sudah adalah 100%.

Bila dibandingkan dengan AKABA provinsi Bali (5,17/1000 KH) capaian AKABA Kota Denpasar sudah dibawah AKABA provinsi Bali.

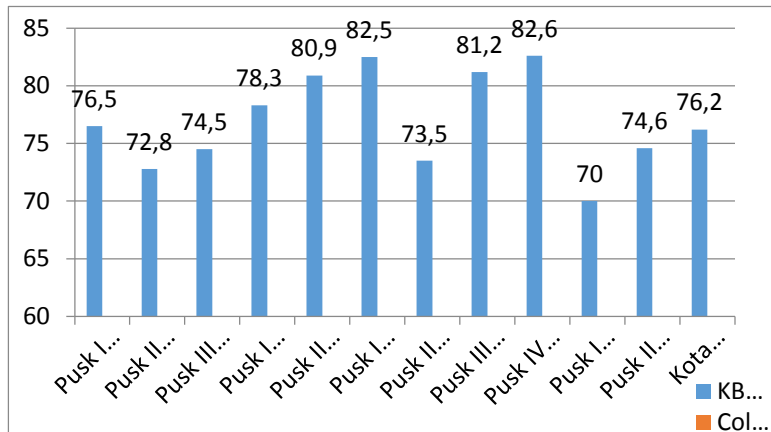
q. Cakupan peserta KB Aktif

Program keluarga berencana (KB) dilakukan dalam rangka mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititik beratkan pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS). Wanita usia subur adalah wanita yang berusia antara 15-49 tahun. Untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran wanita usia subur atau pasangannya diprioritaskan untuk menggunakan alat kontrasepsi.

KB juga merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan 4T yaitu terlalu muda untuk melahirkan (kurang dari 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak kelahirannya dan terlalu tua melahirkan (diatas usia 35 tahun). Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat dilihat dari cakupan peserta KB aktif (pasangan usia subur yang sedang menggunakan salah satu alat/metode kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan) dan cakupan peserta KB yang baru (pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/metode kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan alat/metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran).



Gambar 3.12
 Persentase KB Aktif Menurut Puskesmas Tahun 2019



Sumber: Bidang Kesmas Dikes Kota Denpasar

Jumlah PUS di Kota Denpasar tahun 2019 sebesar 79.961 orang (76,2%) merupakan peserta KB Aktif. Tahun 2019 ditargetkan peserta KB aktif sebesar 70%, dengan capaian 76,2% sehingga kinerja untuk indikator ini 100% (baik)

r. Persentase puskesmas santun lansia

Seluruh puskesmas di Kota Denpasar sudah berperan sebagai puskesmas santun lansia sehingga capaian kinerja ini sudah 100%

s. Persentase usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Masyarakat yang tergolong pra usia lanjut adalah mereka yang telah menjalani lebih dari setengah dari masa hidupnya dan berumur antara 45 – 59 tahun. Sedangkan mereka yang tergolong usia lanjut adalah mereka yang telah mencapai umur di atas 60 tahun. Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya untuk menjaga agar kondisi para pra usia lanjut dan usia lanjut tetap sehat dan produktif di masyarakat dan tidak menjadi beban bagi keluarga. Upaya tersebut telah terintegrasi

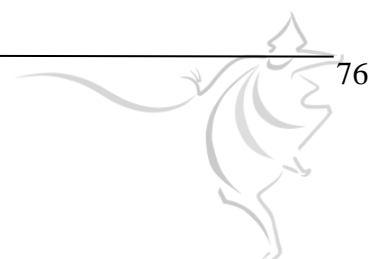


melalui program posyandu usia lanjut. Jumlah masyarakat usia lanjut di Kota Denpasar pada tahun 2019 sebanyak 68.765 Jiwa. Pelayanan kesehatan pada kelompok pra usila dan usila di Kota Denpasar terintegrasi dalam posyandu usia lanjut yang berjumlah 86 buah. Pelayanan yang diberikan posyandu usia lanjut meliputi senam lansia, pemberian paket obat, PMT dan pemeriksaan kesehatan.

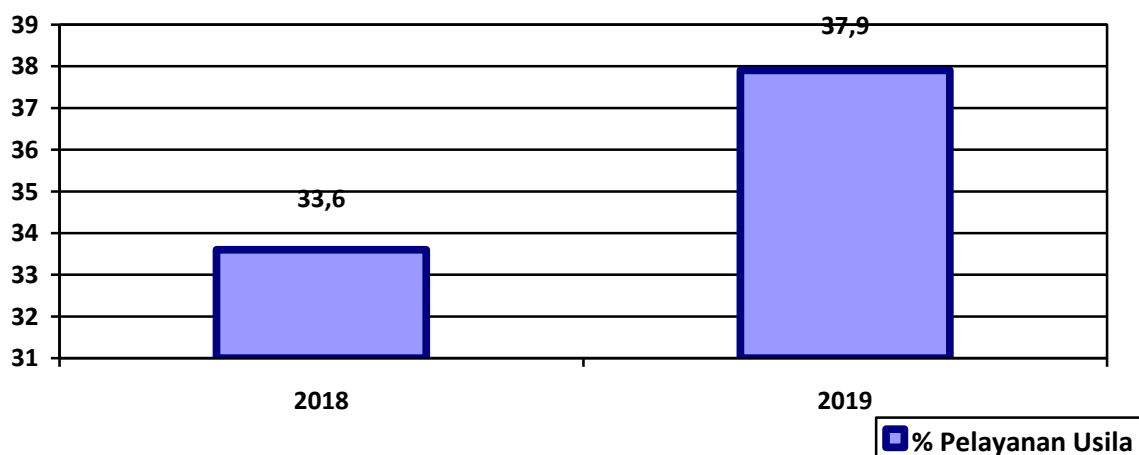
Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan tidak menular meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan gula darah, pemeriksaan gula darah, gangguan mental, gangguan kognitif, tingkat kemandirian usia lanjut, serta anamnesa perilaku berisiko.

Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

Cakupan pelayanan kesehatan pada kelompok pra usila dan usila di Kota Denpasar sebagaimana tergambar pada grafik di atas sudah mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, maka hasil pelayanan kesehatan terhadap penduduk usia lanjut (37,9%) masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% pada tahun 2019. Kinerja untuk indikator ini masih sangat rendah 37,9%, perlu upaya lebih maksimal dengan meningkatkan partisipasi lansia datang ke posyandu lansia serta peningkatan sumber daya manusia dan sarana seperti sarana untuk pemeriksaan gula darah untuk mendukung peningkatan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut.



Gambar 3.13
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila Di Kota Denpasar
Tahun 2018 dan 2019



Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah:

1. Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Denpasar sangat mudah, sudah tersedia Puskesmas yang melayani 24 jam dan fasilitas puskesmas rawat inap
2. Tersedia buku KIA untuk ibu hamil yang merupakan penghubung bagi semua tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil, sehingga kemanapun ibu hamil memeriksakan kehamilan dan melahirkan riwayat kesehatannya tetap bisa dipantau
3. Tersedianya pedoman rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir.

Strategi pemecahan masalah yang telah dilaksanakan:

1. Meningkatkan promosi kesehatan
2. Meningkatkan kepesertaan KB
3. Melaksanakan penjangkaran kasus anemia dan KEK pada remaja putri
4. Mengoptimalkan peran lintas sektor dalam mendukung program kesehatan

3.2.6.2 Evaluasi anggaran

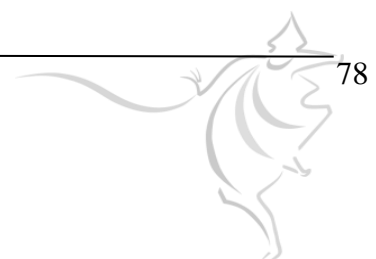
Sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak remaja dan lansia didukung Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan Balita dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak dengan dua kegiatan yaitu:

- Pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu ditargetkan Rp. 33.387.412 dengan realisasi 21.974.272(34,2%).
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir ditargetkan Rp. 1.911.991.340 dengan realisasi Rp. 860.136.358 (44,9%). Kegiatan Kesehatan Ibu bersalin dan Bayi baru lahir fisik 95% keuangan 44,9% karena Dana silva jampersal 2018 tidak dapat direalisasikan karena RKA perubahan turun pada bulan Nopember 2019 dan pasien yang memanfaatkan dana Jampersal pada bulan Nopember dan Desember 2019 tidak ada

Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan Balita dengan kegiatan Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita ditergetkan dana Rp. 120.247.556,00 realisasi Rp. 116.795.890,00 (97%)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan kegiatan Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia) ditergetkan Rp. 239.784.196,00 realisasi Rp. 229.060.314,00 (95,5%)



3.2.7 Sasaran 7: Mengatasi masalah gizi di masyarakat terutama pada kelompok rentan yaitu bayi, balita dan ibu hamil

3.2.7.1 Evaluasi dan analisis kinerja

Mengatasi masalah gizi di masyarakat terutama pada kelompok rentan yaitu bayi, balita dan ibu hamil							
No	Indikator	2018		Capaian kinerja	2019		Capaian kinerja
		target	realisasi		target	realisasi	
1	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk	6%	3,5%	100%	6%	2,3%	100%
3	Persentase bumil mendapat tablet tambah darah (TTD)	99%	100,33%	101%	99%	99,7%	100%
4	Persentase ibu hamil dengan kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan (PMT)	70%	100%	142%	70%	100%	100%
5	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	85%	100%	117,6%	85%	100%	100%
6	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	47%	47,91%	101%	47%	60%	100%
7	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul Vit A	99%	99,9%	100,9%	99%	99,9%	100%
8	Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini (IMD)	43%	41,80%	97,2%	43%	53,3%	100%
9	persentase puskesmas melaksanakan surveilans gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

10	Persentase balita ditimbang berat badannya di posyandu	85%	86,38%	101,6%	85%	85,5%	100%
----	--	-----	--------	--------	-----	-------	------

Dari sepuluh indikator yang mendukung sasaran Mengatasi masalah gizi di masyarakat terutama pada kelompok rentan yaitu bayi, balita dan ibu hamil, seluruhnya (100%) sudah berkinerja baik.

a. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan.

Cakupan gizi buruk mendapatkan perawatan: Tahun 2019 tidak ditemukan balita gizi buruk. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

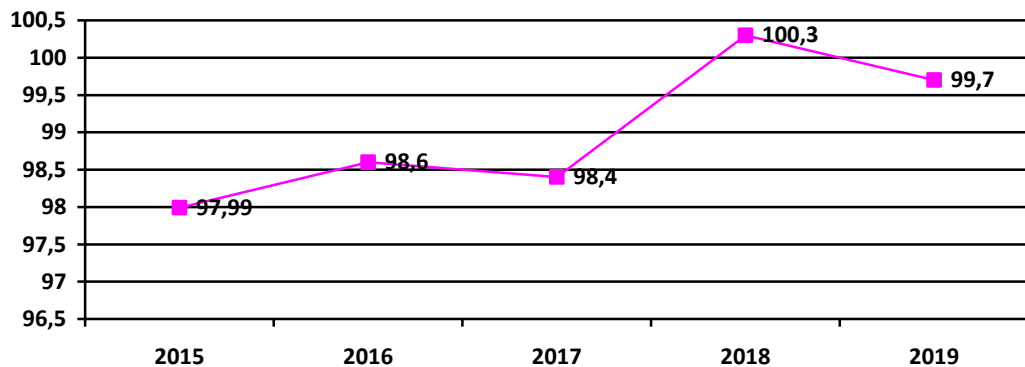
b. Prevalensi balita kurang dan gizi buruk.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2019 menargetkan Prevalensi balita kurang dan gizi buruk maksimal sebesar 6% dari seluruh balita yang ada, capaiannya 2,3%. Capaian masih relative sama bila dibandingkan dengan Prevalensi balita kurang dan gizi buruk tahun 2018 (3,49%). Capaian indikator ini adalah 100%. Penentuan balita gizi kurang menggunakan indikator berat badan dibandingkan dengan umur balita. Hasil riskesdas 2018 Prevalensi balita kurang dan gizi buruk secara Nasional adalah sebesar 17,7%.

c. Persentase bumil mendapatkan tablet tambah darah (TTD)

Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil merupakan upaya untuk menekan anemia pada ibu hamil. Selama ini upaya penanggulangan anemia gizi difokuskan kepada sasaran ibu hamil dengan suplementasi tablet besi folat (200 mg $FeSO_4$ dan 0,25 mg asam folat) dengan memberikan setiap hari 1 tablet selama minimal 90 hari berturut-turut. Cakupan pemberian tablet besi dalam kurun waktu lima tahun terakhir terutama pada ibu hamil seperti pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.14
Cakupan Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
Tahun 2015 s/d 2019



Sumber: Bidang Kesmas dikes Kota Denpasar

Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2016-2021 ditetapkan target bumil mendapatkan tablet tambah darah tahun 2019 sebesar 99%. Capaiannya sebesar 99,7% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

d. Persentase ibu hamil dengan kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan (PMT)

Kesehatan ibu hamil sangat berpengaruh terhadap bayi yang dikandungnya. Ibu dengan kurang energi kronik (KEK) dapat menyebabkan bayi yang dikandung juga menderita kekurangan gizi. Tahun 2019 ditemukan 707 orang bumil yang menderita KEK seluruhnya sudah mendapat makanan tambahan sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100%.

c. Persentase balita kurus mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan.

Tahun 2018 ditemukan 602 balita kurus di Kota Denpasar dan seluruhnya sudah mendapatkan Pemberian makanan tambahan (PMT), capaian kinerja indikator ini sebesar 100%.

e. Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar menargetkan Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif tahun 2019 sebesar

47% dengan capaian sebesar 60% sehingga kinerja indikator ini adalah 100% (sangat Baik).

Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk:

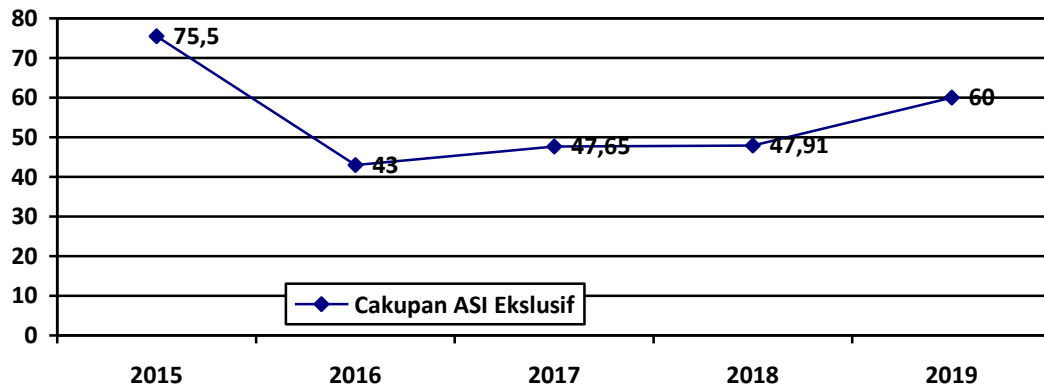
- Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai berumur enam bulan, dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.
- Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya
- Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah terhadap ASI Eksklusif (Kemenkes, 2015)

Kebijakan global (WHO dan Unicef) dan kebijakan nasional merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai umur 6 bulan, kemudian diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) sejak berumur 6 bulan dan meneruskan pemberian ASI selama 2 tahun. ASI eksklusif adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu) saja pada bayi mulai dari lahir sampai berumur 6 bulan tanpa diberi makanan tambahan apapun karena sampai umur tersebut kebutuhan zat gizi bayi bisa dipenuhi dari ASI atau air susu ibu saja.

ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibody karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam jumlah yang tinggi sehingga pemberian ASI Eksklusif dapat mengurangi resiko kematian pada bayi.

Gambaran cakupan ASI Eksklusif di Kota Denpasar tahun 2014-2019 seperti pada grafik di bawah ini :

Gambar 3.15
Cakupan ASI Eksklusif Tahun 2015 s.d 2019



Sumber: Bidang Kesmas Dikes Kota Denpasar

Langkah yang telah dilakukan meningkatkan cakupan ASI Eksklusif di Kota Denpasar adalah meningkatkan promosi tentang pentingnya ASI Eksklusif dan teknik penyimpanan ASI yang dapat dilakukan oleh ibu bekerja sehingga ASI nya tetap bisa dinikmati bayi dan ibu tidak perlu berhenti bekerja. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi ke instansi pemerintah dan swasta tentang pentingnya menyiapkan ruangan sebagai pojok ASI.

f. Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul Vit A

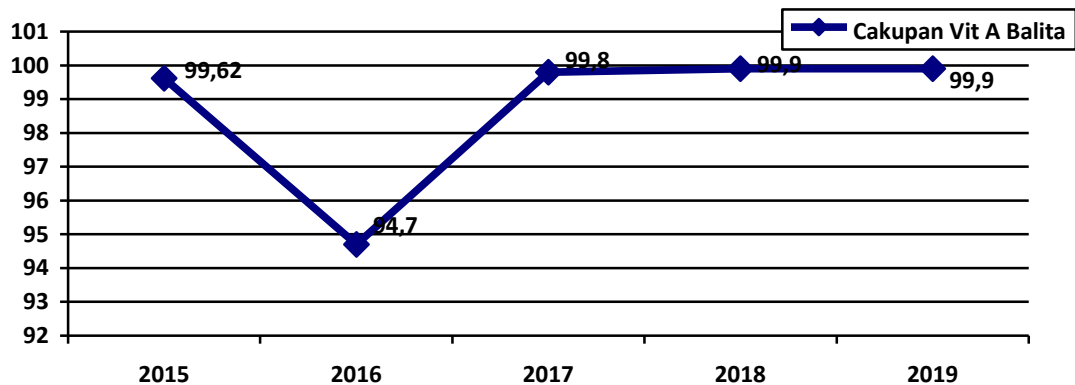
Target Renstra untuk indikator Cakupan balita mendapatkan kapsul vitamin A ditahun 2019 adalah 99%, realisasinya sebesar 99.9% sehingga capaian kinerjanya sudah sangat baik .

Pemberian kapsul vit A dilaksanakan dalam rangka mencegah dan menurunkan prevalensi kekurangan vitamin A (KVA) pada balita. Cakupan yang tinggi dari pemberian kapsul vit A berperan terhadap penurunan angka kematian, pencegahan kebutaan serta pertumbuhan dan kelangsungan hidup anak. Upaya penanggulangan masalah kurang vitamin A masih bertumpu pada pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada anak balita pada bulan Pebruari dan Agustus. Distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi diintegrasikan melalui posyandu dan



Puskesmas. Cakupan pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini :

Gambar 3.16
Cakupan Pemberian Vitamin A Di Kota Denpasar
Tahun 2015 s.d 2019



Sumber: Bidang Kesmas Dikes Kota Denpasar

Pada gambar diatas terlihat cakupan pemberian Vitamin A dosis tinggi sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini membuktikan meningkatnya partisipasi masyarakat membawa balita ke posyandu.

g. Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini (IMD)

Bayi baru lahir di Kota Denpasar tahun 2019 sebanyak 16.538 orang dari jumlah tersebut baru 8.819 (53,3%) orang yang mendapatkan IMD. Perlu usaha dan pendekatan kepada seluruh fasilitas kesehatan yang melayani persalinan agar melaksanakan program IMD kepada bayi baru lahir. IMD sangat penting karena merupakan awal keberhasilan asi eksklusif. Renstra dikes kota Denpasar tahun 2016-2021 menargetkan IMD sebesar 43% sedangkan capainnya 53,3%. Kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

h. Persentase puskesmas melaksanakan surveilans gizi

Seluruh puskesmas di Kota Denpasar sudah melaksanakan surveilans gizi sehingga kasus balita kurus dan gizi buruk dapat ditemukan dan dideteksi lebih awal dan intervensinya juga dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100%

e. Persentase balita ditimbang berat badannya di posyandu

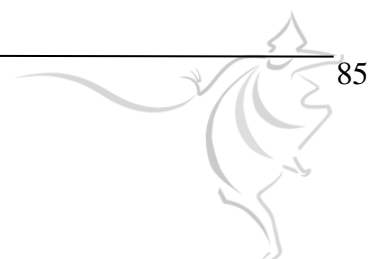
Perkembangan balita harus dipantau setiap bulan. Renstra dikes kota Denpasar tahun 2016-2021 menargetkan 85% balita ditimbang di posyandu. Capaian balita ditimbang di posyandu tahun 2015 adalah sebesar 85,5% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sudah mencapai 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah:

1. Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Denpasar sangat mudah, sudah tersedia Puskesmas yang melayani 24 jam dan fasilitas puskesmas rawat inap
2. Peran serta masyarakat yang cukup baik dalam membawa balitanya ke posyandu
3. Dukungan lintas sector
4. Dukungan kebijakan anggaran

3.2.7.2 Evaluasi Anggaran

Sasaran Mengatasi masalah gizi di masyarakat terutama pada kelompok rentan yaitu bayi, balita dan ibu hamil didukung oleh program Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan Balita dengan kegiatan Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita ditargetkan Rp. 120.247.556,00 dengan realisasi Rp. 116.795.890,00 (97%).



3.2.8 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular.

3.2.8.1 Evaluasi dan analisis kinerja

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular.							
No	Indikator	2018		Capaian kinerja	2019		Capaian kinerja
		target	realisasi		target	realisasi	
1	Incidence rate penyakit DBD	205/10 0.000 pddk	12.4 per 100.000 pddk	100%	200/10 0.000 pddk	128,8 per 100.000 pddk	100%
2	CFR penyakit DBD	< 1 %	tidak ada kematian DBD	100%	< 1 %	0,25%	100%
3	Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan	85%	100.00%	117%	85%	100%	100%
4	Prevalensi HIV /AIDS	<0,5	0.33%	100%	<0,5	0.33%	100%
5	Persentase angka kasus HIV yang diobati	52%	73.63%	140%	55%	73.63%	140%
6	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	90.60%	90%	100%	90.60%	125%
7	Angka kesembuhan penderita TB	80%	77%	96,3%	78%	64,1%	85%
8	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	100%	100%	100%	85%	100%
9	Persentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang dari 24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	100%	100%	100%	18,6%
11	Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pos pembinaan terpadu (Pos Bindu) PTM	32 DESA/ KEL	32 DESA/KE L	100%	38 DESA/ KEL	109 DESA/KE L	100%

13	Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok	10 Pusk	11 Pusk	110%	11 Pusk	11 Pusk	110%
14	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun)	100%	17.57%	17,6%	100%	17.57%	18,4%
15	jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks	1800 orang	3908 orang	217%	1900 orang	11.855 orang	100%
16	Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	15 sekolah	15 sekolah	100%	15 sekolah	15 sekolah	100%
17	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100%	94.7%	94,7%	100%	100%	94,7%
18	Persentase desa yang mencapai universal child immunisation (UCI)	100%	100%	100%	95%	100%	100%
19	Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes militus	100%	19,03%	19%	100%	19,03%	44,21%
20	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	100%	8,6%	8,6%	80%	8,6%	15,54%

Dari 20 indikator yang mendukung sasaran Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular 17 indikator (85%) sudah berkinerja baik.

a. Incidence rate dan case fatality rate DBD

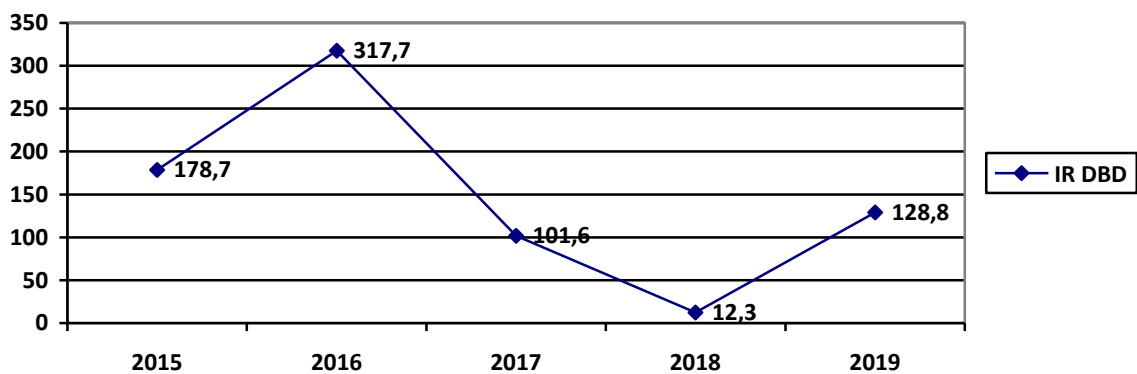
Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk aedes aegypty. Serangan penyakit DBD berimplikasi luas terhadap kerugian material dan moral berupa biaya rumah sakit dan pengobatan pasien, kehilangan produktivitas kerja dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa.

Kota Denpasar merupakan daerah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria

kejadian luar biasa (KLB) DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya

Jumlah kasus DBD pada tahun 2019 adalah 1.220 kasus, terdiri dari 682 penderita laki-laki dan 538 perempuan. Incidence rate DBD pada tahun 2019 adalah sebesar 128,8 per 100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan IR DBD tahun 2018 (12,3 sebesar per 100.000 penduduk) maka terjadi peningkatan IR DBD yang cukup bermakna. Pada tahun 2019 terjadi 3 Kematian akibat DBD (CFR=0,25%)

Gambar 3.17.
IR DBD Per 100.000 penduduk di Kota Denpasar
Tahun 2015 s/d 2019



Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini, 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, menutup dan mengubur) plus menabur larvasida.

Tahun 2019 incidence rate DBD sudah dibawah target yang ditetapkan restra dinas kesehatan Kota Denpasar tahun 2016-2021 hal ini tidak terlepas dari inovasi yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan seperti program GEMA PETIK

(Gerakan Mandiri Pemantau Jentik) oleh anggota keluarga di rumahnya sendiri sekurang – kurangnya seminggu sekali

Seluruh pasien DBD yang ditemukan sudah ditangani sesuai standar, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

b. CFR Penyakit DBD

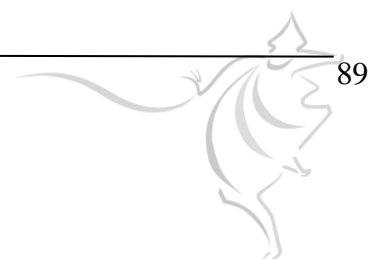
Tahun 2019 renstra dikes kota Denpasar menargetkan CFR penyakit DBD < 1%, sedangkan CFR penyakit DBD tahun 2019 sebesar 0,3%. Capaian Kinerja Indikator ini sebesar 100%.

c. Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan sesuai tata laksana ditargetkan 85% realisasi 100%, sehingga capaian kinerja indicator ini sebesar 100%

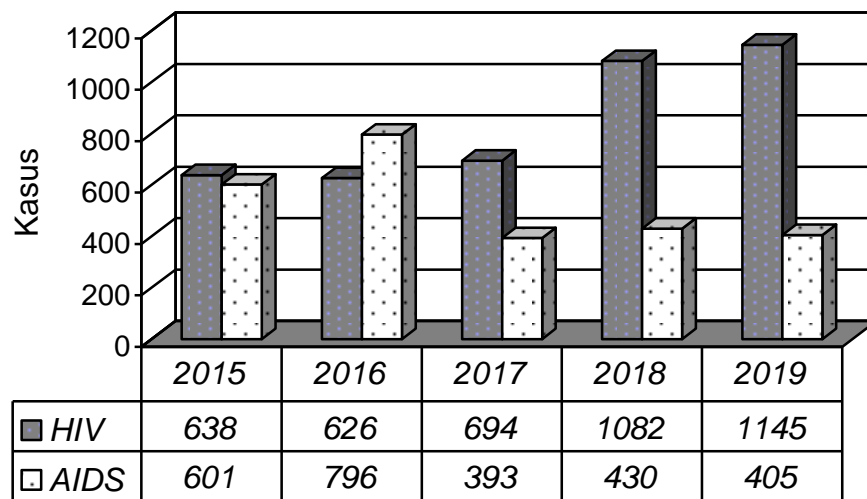
d. Prevalensi kasus HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar terdapat seluruh Puskesmas sudah melaksanakan layanan VCT. Penyebaran HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 3.17
Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar
Tahun 2015 s/d 2019



Sumber bidang P2P dikes Kota Denpasar

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan. Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV positif.

Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala.

Prevalensi kasus HIV tahun 2018 masih dibawah 0,5% sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100%.

- e. Penderita HIV/AIDS mendapatkan pengobatan sesuai standar

Untuk tahun 2018 ditargetkan 52% penderita HIV/AIDS mendapatkan pengobatan sesuai standar, capainnya sebesar 74,19% Penderita HIV/AIDS sudah terobati sehingga capaian kinerja indikator ini sudah sangat baik.

f. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

100% masyarakat yang diduga terinfeksi HIV diamanatkan untuk mendapatkan pemeriksaan sesuai standar di tahun 2018 sesuai dengan SPM berdasarkan PMK No. 4 tahun 2019. Tahun 2019 estimasi penderita HIV adalah sebanyak 20.910 orang, 26.155 orang mendapatkan pelayanan HIV (125%). Capaian kinerjanya sudah dalam katagori baik. Capaian ini perlu dipertahankan dan Kedepannya perlu ditingkatkan pola pendekatan kepada pasien agar mau ditest HIV secara sukarela sehingga capaian indikator ini dapat dipertahankan dan penderita dapat diobati lebih awal.

g. Angka Kesembuhan penderita TB

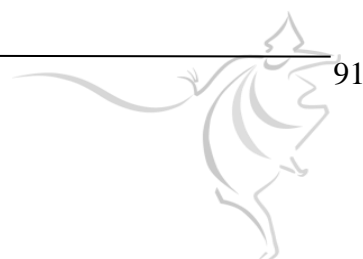
Angka kesembuhan penderita TB di tahun 2019 mencapai 64,1% dari target 85%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 75% sehingga kedepannya perlu dilakukan upaya - upaya untuk meningkatkan angka kesembuhan penderita TB.

h. Persentase terduga tubercolosis mendapatkan pemeriksaan sesuai standar

Indikator Persentase terduga tubercolosis mendapatkan pemeriksaan sesuai standar ditahun 2019 ditargetkan 100%. Jumlah orang terduga TB tahun 2019 sebanyak 2.007 orang dan 1.715 (85,5%) sudah mendapatkan pelayanan pemeriksaan sesuai standar sehingga kinerja indicator ini sebesar 100%.

i. Persentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang dari 24 Jam

Indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja indicator ini sebesar 100%



j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Tahun 2019 ditargetkan 2.848 orang penderita gangguan jiwa berat ditemukan dan dilayani sebanyak 529 orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), Kinerja pelayanan 18,6%. Kedepannya akan dilakukan koordinasi ke pusat karena target ini terlalu tinggi untuk bias dipenuhi

k. Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam.

Pada tahun 2019 terjadi 3 kejadian luar biasa (KLB) dan seluruhnya sudah mendapatkan penanganan kurang dari 24 jam sehingga kinerja indikator ini 100%. Penanganan KLB kurang 24 jam ini dapat membantu penanganan kasus yang lebih cepat dan tepat serta mencegah meluasnya KLB.

l. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pos pembinaan terpadu (Pos Bindu) PTM

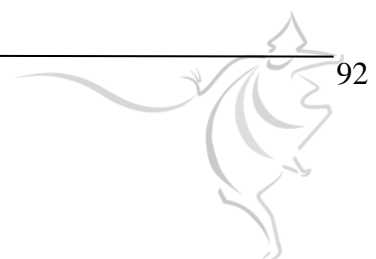
Renstra Dinas kesehatan Kota Denpasar menargetkan 38 desa melaksanakan Posbindu di tahun 2019, realisasinya 109 sehingga sudah melebihi target yang ditetapkan. kinerja indikator ini sebesar 100%

m. Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok. Dari 11 puskesmas di Kota Denpasar seluruhnya sudah melayani konseling berhenti merokok sehingga capaian kinerja indikator ini sudah baik (100%)

n. Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun)

Setiap Warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang terdiri dari:

- 1) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut
- 2) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer
- 3) Deteksi kemungkinan diabetes militus dengan menggunakan test cepat gula darah
- 4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku
- 5) Pemeriksaan ketajaman penglihatan



6) Pemeriksaan ketajaman pendengaran

7) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun

Tahun 2019 terdapat 674.174 penduduk berusia 15-59 tahun, dari jumlah ini sebanyak 124.077 orang sudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar. Capaian kinerja untuk indikator ini 18,4%. Capaian indikator ini rendah dan belum mencapai 100% kedepannya perlu ditingkatkan sosialisasi kepada pihak terkait dan penyiapan anggaran untuk pengadaan logistik ditingkatkan.

o. jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks. Tahun 2019 ditargetkan 1.900 wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks, realisasinya 11.855 orang sehingga capaian kinerjanya sudah lebih dari 100% sangat baik

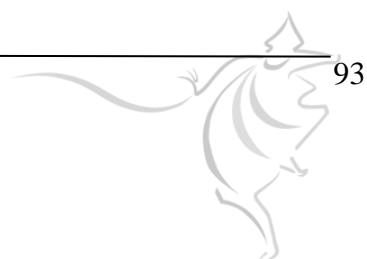
p. Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)

Tahun 2019 ditargetkan 15 sekolah mendapatkan pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP), dan terealisasi 15 sekolah capaian kinerja 100%

q. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

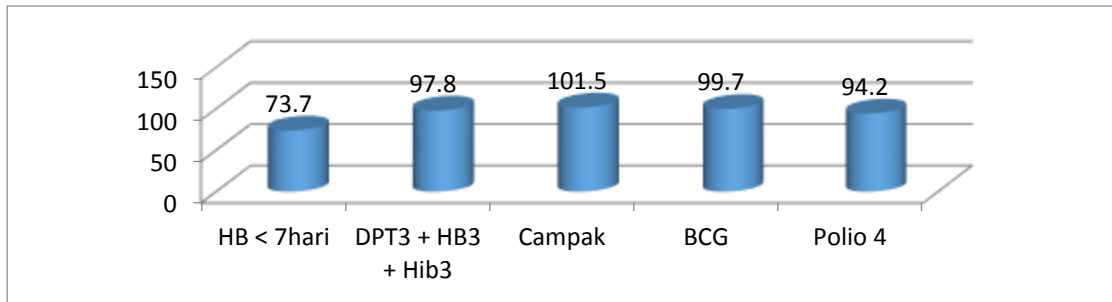
Tahun 2019 dari 16.266 sasaran bayi survivan infant yang ditargetkan, sebanyak 16.388 bayi sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap (100%). Renstra Dikes menargetkan 100% bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2019, sehingga capaian kinerja untuk indikator sasaran ini sudah 100%.

Bayi dan anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi terserang penyakit menular yang dapat mematikan, seperti: Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Radang Selaput Otak, Radang Paru-Paru. Salah satu pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar kelompok berisiko ini terlindungi adalah melalui imunisasi.



Program imunisasi dasar lengkap (LIL/Lima Imunisasi dasar lengkap) pada bayi yang dicanangkan pemerintah meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HIB, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak MR.

Gambar 3.14
Persentase Capaian Imunisasi Di Kota Denpasar
Tahun 2019



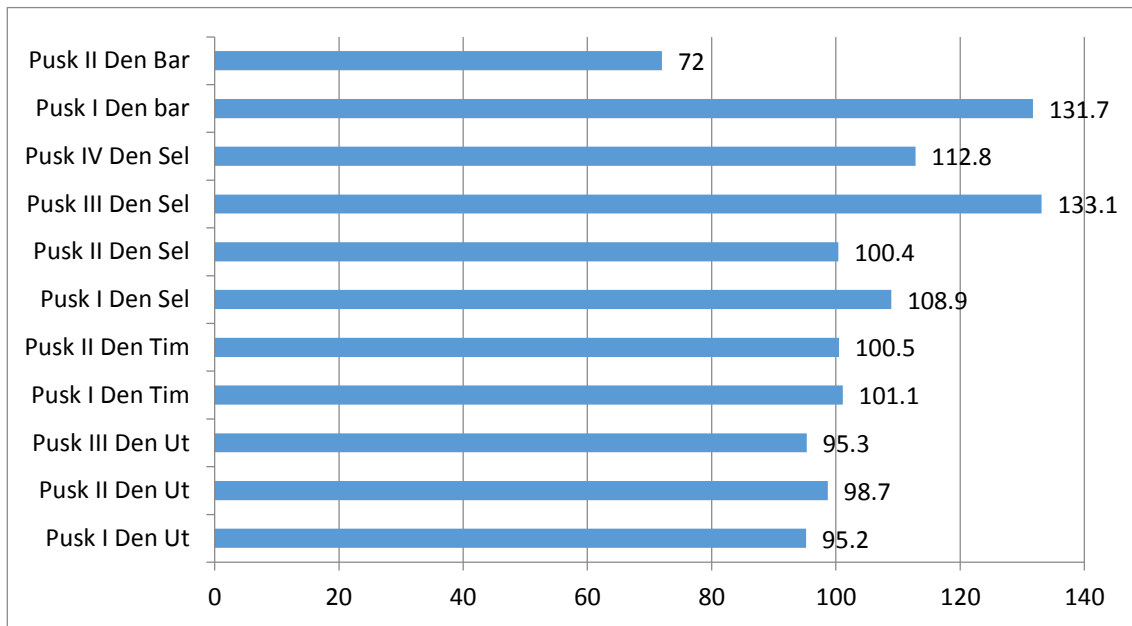
Sumber: Bidang P2P Dikes Kota Denpasar

Idealnya seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai umurnya, sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat optimal.

Setiap bayi diharapkan agar mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap diukur dengan imunisasi dasar lengkap.

Data capaian imunisasi dasar lengkap berdasarkan puskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.15
 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Puskesmas
 Di Kota Denpasar Tahun 2019



Su

mber: Seksi surveilans dan pencegahan penyakit Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar

Pada grafik diatas tergambar bahwa capaian imunisasi dasar lengkap terendah di puskesmas II Denpasar Barat.

r. Persentase desa yang mencapai universal child immunisation (UCI)

Tujuan program imunisasi adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari cakupan desa/kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) yaitu 80% sasaran mendapatkan imunisasi lengkap. Seluruh Desa/Kel di Kota Denpasar sudah mencapai UCI. Capaian kinerja kota denpasar untuk indikator UCI sebesar 100% (baik)

s. Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes militus

Upaya pengendalian diabetes bertujuan untuk mencegah komplikasi karena Komplikasi Diabetes Militus akan menyebabkan beban yang sangat besar bagi individu, keluarga, dan juga pemerintah.

Tahun 2019, dari 14.487 penderita DM yang ditargetkan sebanyak 6.405 (44,21%) sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar meningkat dibandingkan tahun 2018 (2,5%).

Standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan mengamanatkan 100% penderita diabetes militus mendapatkan pelayanan kesehatan, capaian dinas kesehatan kota Denpasar masih jauh dibawah target sehingga kedepannya perlu ditentukan strategi untuk meningkatkan capaian pelayan penderita DM.

t. Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan. Standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan mengamanatkan 100% penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari 177.627 perkiraan penderita hipertensi di Kota Denpasar, 15,54% sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar, capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2018 (7,6%). Capaian dinas kesehatan kota Denpasar masih jauh dibawah target (100%) sehingga kedepannya perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penemuan dan penanganan penderita hipertensi sehingga capaian pelayanan penanganan penderita hipertensi bisa mencapai target.

Faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah:

1. Sistem kewaspadaan dini berjalan baik
2. Jejaring TB Berjalan baik
3. Peran swasta/LSM dalam penanggulangan penyakit HIV cukup besar
4. Adanya jumentik
5. Dukungan anggaran untuk sasaran ini cukup tinggi



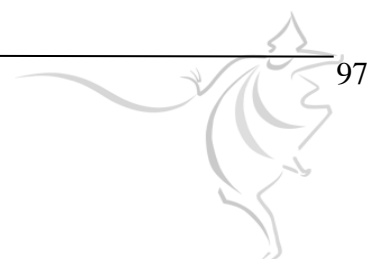
Strategi dalam meningkatkan pencapaian sasaran ini adalah

1. meningkatkan kerjasama dengan lintas sector terkait
2. Menjalin kerjasama untuk meningkatkan pelaporan dari RS dan klinik yang ada di Kota Denpasar
3. Meningkatkan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan

3.2.8.2 Evaluasi Anggaran

Sasaran Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular di dukung oleh program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan 11 kegiatan:

1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk target Rp. 397.473.885 realisasi Rp. 261.731.200 (68,97 %) karena kasus DBD menurun sehingga upah dan makmin petugas masih sisa
2. Pengadaan alat dan bahan-bahan fogging target Rp. 241.957.219 realisasi 189.427.300 Rp. (78.28%)
3. Pengadaan vaksin penyakit menular target Rp. 2.121.156.185 realisasi Rp. 1.929.808.500 (90,97%)
4. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah target Rp. 8.423.413.500 realisasi Rp. 8.423.413.500 (98,66%)
5. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular target Rp. 3.728.246.925 realisasi Rp. 8.443.288.550 (35,24%) dikarenakan efisiensi dari pengadaan
6. Pencegahan dan penanggulangan penyakit endemic/epidemic target Rp. 8.616.313.000 realisasi Rp. 8.443.288.550 (97,99%)
7. Peningkatan surveillence epidemilogi dan penanggulangan wabah target Rp. 32.197.000 realisasi Rp. 31.766.500 (98,66%) karena tidak ada ditemukan kasuskejadian luar biasa dan berpotensi wabah
8. Peningkatan Komunikasi informasi dan edukasi(KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit target Rp. 2.251.958.014 realisasi



Rp. 2.070.249.946 (91,93%) karena efisiensi pengadaan alat krio dan alat tes narkoba

9. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosa (TBC) target Rp. 710.858.660 realisasi Rp. 681.773.737 (95,90%)
10. Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS target Rp. 1.466.052.371 realisasi 1.373.207.633 (93,66%)
11. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit target Rp.486.854.210 realisasi Rp. 307.520.168 (63,16%)

3.2.9 Meningkatnya kualitas lingkungan. Pada sasaran ini ditetapkan 15 indikator sasaran.

3.2.9.1 Evaluasi dan analisis kinerja

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular.							
No	Indikator	2018		Capaian kinerja	2019		Capaian kinerja
		target	realisasi		target	realisasi	
1	Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	95%	95.16%	100%	95%	93,3%	900%
2	Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	persentase desa/kel yang ODF/stop buang air besar sembarangan	80%	86%	80%	80%	93%	100%
4	Persentase desa/kel melaksanakan STBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase cholinesterase darah masyarakat yang berpotensi terpapar pestisida memenuhi syarat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase tempat pengelolaan pestisida memenuhi syarat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	Cakupan pengendalian vektor lalat di TPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat	75%	99.89%	133%	75%	100%	100%
9	Persentase rumah sehat	98%	98%	100%	98%	98%	100%
10	Persentase sumber air minum memenuhi syarat kesehatan	66%	66.20%	100%	68%	89,1%	100%
11	Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	35%	36.00%	102%	40%	40%	102%
12	Persentase hasil produksi Rumah Tangga tidak mengandung bahan berbahaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah Desa/kelurahan yang mengikuti lomba kebersihan dan PSN Tingkat Kota Denpasar	4 desa/kel di 4 kec	4 desa/kel di 4 kec	100%	4 desa/kel di 4 kec	4 desa/kel di 4 kec	100%
15	Jumlah industri pangan rumah tangga bersertifikat produksi	80	80	100%	80	80	100%

a. Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

TTU memenuhi syarat kesehatan ditargetkan sebesar 95% di tahun 2019, capaiannya sebesar 93,3%, sehingga kinerja indikator ini sudah baik (90%)

Ada beberapa kegiatan dalam pemeriksaan tempat-tempat umum yaitu:

- Pemeriksaan / Pembinaan Sanitasi Hotel dan sertifikat Laik Sehat Hotel. Setiap hotel harus memiliki surat keterangan laik sehat

hotel (Permenkes RI No. 80/ Menkes / Per / II / 1990). Kegiatan Pembinaan / pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dan gangguan kesehatan serta untuk mendorong pengembangan Pariwisata Nasional. Persyaratan Hiegiene bagi hotel adalah ketentuan – ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.

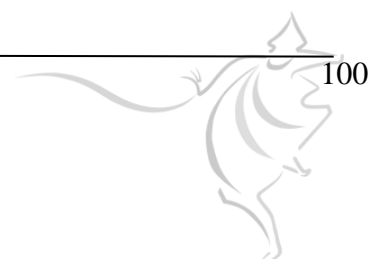
- Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit. Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit merupakan penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan Rumah sakit menyangkut Variabel seperti : Konstruksi Umum, Ruang bangunan (Ruang perawatan, Ruang Operasi, Ruang Laboratorium, Ruang Sterilisasi dll) penyehatan makanan dan minuman, penyehatan air, penanganan sampah, penanganan tempat pencucian, pengendalian serangga dan tikus penyehatan kesehatan lingkungan serta pengambilan Sampel air Limbah RS, makanan, air bersih dan bahan kimia dilakukan swapantau oleh petugas instalasi RS setiap bulan (Kep Men.Kes 1204/menkes/SK/X/2004).
- Sarana pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA

b. Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis

Tahun 2019 ditargetkan seluruh puskesmas yang ada di Kota Denpasar menyelenggarakan pengelolaan limbah medis dan kinerja indikator ini sudah mencapai 100%. Untuk limbah cair masing – masing puskesmas memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL) sedangkan untuk limbah medis padat puskesmas bekerjasama dengan RSU Wangaya

c. Desa/ Kel ODF

Tahun 2019 ditargetkan 80% desa/kel di kota Denpasar sudah ODF stop buang air besar sembarangan dan target ini sudah tercapai sehingga kinerja indicator ini = 100%



d. Desa/ Kel melaksanakan STBM.

Tahun 2019 pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ditargetkan 100% Desa melaksanakan STBM dan target ini sudah tercapai sehingga kinerja indikator ini sudah sangat baik

e. Persentase cholinesterase darah masyarakat yang berpotensi terpapar pestisida memenuhi syarat

f. Persentase tempat pengelolaan pestisida memenuhi syarat

Renstar dinas kesehatan menargetkan 100% tempat pengelolaan pestisida memenuhi syarat dan sudah 100% terlaksana sehingga capaian indikator ini 100%

g. Cakupan pengendalian vektor lalat di TPS capaian indicator kinerja ini sudah 100%

h. Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat

Kepemilikan jamban bagi keluarga merupakan sesuatu yang vital karena dengan adanya jamban di masing-masing rumah tangga berbagai penyakit yang penularannya melalui kotoran manusia seperti kecacingan, diare dan sebagainya dapat dicegah sedini mungkin. Persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak di Kota Denpasar tahun 2019 ditargetkan sebesar 75% dan realisasinya sebesar 100% penduduk Kota Denpasar memiliki akses sanitasi dasar yang layak, capaiannya sudah 100%

i. Persentase rumah sehat

Kondisi lingkungan di Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh perilaku hidup manusia dalam menata rumah dan alam sekitarnya. Tahun 2019 renstra dikes Kota Denpasar menargetkan 98% rumah yang ada dikota Denpasar sudah merupakan rumah sehat dan realisasinya 98% sudah merupakan rumah sehat. Indikator kinerja kegiatan ini sudah mencapai 100%.

j. Persentase sumber air minum memenuhi syarat kesehatan

Cakupan keluarga yang memiliki akses air bersih di Kota Denpasar pada tahun 2019 mencapai 89,1%. Dengan meningkatnya

jumlah masyarakat yang sudah bisa mengakses air bersih di Kota Denpasar, diharapkan penyakit-penyakit menular melalui air (*water borne disease*) seperti diare, dapat dicegah atau sedapat mungkin diturunkan kasusnya. Renstra dinas kesehatan kota Denpasar menargetkan 68% keluarga memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas, sedangkan capaiannya sudah 89,1% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

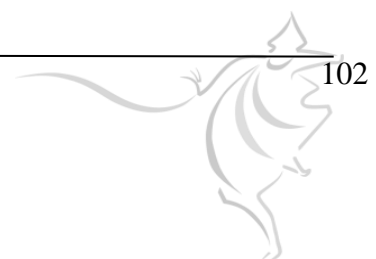
Penyelenggara air minum di Kota Denpasar adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar (PDAM Kota Denpasar), tahun 2019 sudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap kualitas air minum (fisik, bakteriologi dan kimia) dengan hasil memenuhi syarat.

k. Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan

Tahun 2019 dikota Denpasar terdapat 2.864 Tempat pengolahan makanan. Hasil pemeriksaan di tahun 2019 menunjukkan 1.149 (40,12%) TPM memenuhi syarat yang terdiri dari jasa boga sebanyak 95,5%, rumah makanan/restoran sebanyak 100%, depot air minum sebanyak 88,4%, dan makanan jajanan sebanyak 17,7%. Rendahnya persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan di tahun 2018 disebabkan karena adanya peraturan baru bahwa TPM dapat dikategorikan memenuhi syarat kesehatan apabila sudah memiliki sertifikat laik sehat, hal ini sangat sulit dipenuhi terutama untuk pedagang makanan jajanan. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar menargetkan 40 % TPM memenuhi syarat di tahun 2019, capaiannya 40% sehingga kinerja untuk indikator ini sudah baik (100%).

l. indikator persentase hasil produksi rumah tangga tidak mengandung bahan berbahaya

Indikator persentase hasil produksi rumah tangga tidak mengandung bahan berbahaya dari target yang ditetapkan sebesar 100% sudah bisa tercapai sehingga kinerjanya sudah baik.



m. Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

Tahun 2019 ditargetkan 100% desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat dan sudah tercapai 100% sehingga capaian kinerja ini sangat baik (100%)

n. Tahun 2019 juga sudah diselenggarakan lomba PSN dan kebersihan dengan capaian kinerja 100%

o. Jumlah industri pangan rumah tangga bersertifikat produksi

Indikator kinerja ini ditargetkan 100% dan sudah terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%

Faktor pendukung capaian sasaran ini adalah:

1. Adanya pembinaan terhadap industri rumah tangga diharapkan mampu memotivasi pengusaha untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan standard hygiene sanitasi personal dan lingkungan yang baik sehingga hasil produksinya aman untuk dikonsumsi. Kedepannya perlu digiatkan Strategi pencapaian sasaran ini yaitu dengan Meningkatkan pembinaan kepada industri rumah tangga.
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sector
3. Adanya dukungan kebijakan anggaran yg cukup melalui APBD

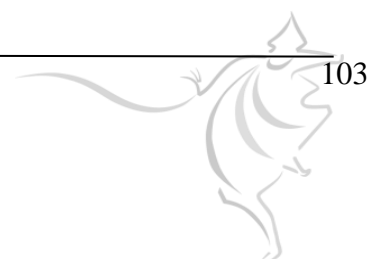
3.2.9.2 Evaluasi Anggaran

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan didukung oleh Tiga Program

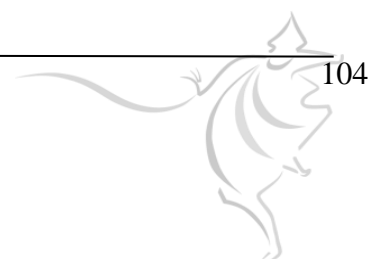
1. Pengembangan Lingkungan Sehat :

- Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Target Rp. 149.944.000,00 realisasi 95.495.100,00 Rp. (63,7%)
- Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Target Rp. 72.630.280,00 Realisasi Rp. 68.923.100,00 (94,9%)

2. Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan



- Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Target Rp. 34.345.080 realisasi Rp. 29.266.000 (85,2%)
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan
- Penyelenggaraan penyehatan lingkungan target 135.142.000,00 realisasi 134.518.000,00 (99,5%)
 - Penyelenggaraan penyehatan tempat-tempat umum target 467.540.000,00 realisasi Rp. 457.111.620,00 (98,7)
4. Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Rumah tangga target 102.913.600 realisasi 102.877.500 (99,9%)
 - Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran target 54.456. 000 realisasi 53.674.500 (98,6%)
 - Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan kantin sekolah target 110.822.500 realisasi 110.470.000 (99,7%)

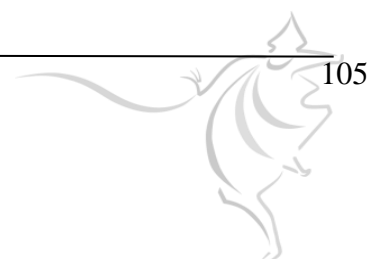


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Denpasar melaksanakan 18 Program dengan 54 Kegiatan, seluruh program sudah terlaksana dengan baik, beberapa kegiatan realisasi keuangannya dibawah 80% diantaranya
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal realisasi fisik 100% keuangan 82 % Sisa dana dikarenakan efisiensi
 - Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan fisik 95 Keuangan 58 % dikarenakan ada beberapa item obat yang tidak bisa diadakan karena tidak tersedia di penyedia dan terdapat efisiensi dan pemusnahan obat tidak dilaksanakan karena ada perubahan sistem dalam proses pemusnahan obat
 - Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya fisik 95 % Keuangan 81 % Sisa Uang karena jumlah yang dianggarkan tidak sesuai dengan jumlah kuota
 - Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan fisik 100 % Keuangan 67 dikarenakan biaya cek up anggota DPR dibawah Pagu
 - Kegiatan Peningkatan Promosi Obat bahan alam indonesia di dalam dan luar negeri fisik 100 % keuangan 82 % karena efisiensi perjalanan Dinas
 - Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan fisik 100% Keuangan 74 % karena sisa uang monev lapangan dilaksanakan secara simultan dan efisiensi perjalanan Dinas



- Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat fisik 100% keuangan 63% dikarenakan Makmin kegiatan rapat Pokja Desa Sehat sudah menggunakan dana Desa
- Kegiatan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat fisik 100 keuangan 79 % karena makmin pengumuman pemenang lomba PSN dan kebersihan tidak diamprah karena sudah digabung pada saat HKN
- Kegiatan Penyemprotan Foging sarang nyamuk fisik 90 % keuangan 25 % karena kasus DBD menurun sehingga upah dan makmin petugas masih sisa
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular fisik 99% keuangan 47% dikarenakan efisiensi dari pengadaan
- Kegiatan Peningkatan Suveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah fisik 95,5 keuangan 77 % karena tidak ada ditemukan kasuskejadian luar biasa dan berpotensi wabah
- Kegiatan Peningkatan nformasi dan edukasi (KIE)Pencegahan dan pemberantasan Penyakit fisik 100 Keuangan 84 % karena efisiensi pengadaan alat krio dan alat tes narkoba
- Kegiatan Evaluasi dan pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan fisik 100 % Keuangan 82 % karena tim pendampingan akreditasi tidak bisa memenuhi pendampingan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Kegiatan pembinaan dan penilaian tenaga kesehatan teladan fisik 90% Keuangan 79% karena Jumlah Nakes teladan yang direncanakan 9 katagori ,realisasi 7 karena 2 katagori tidak memenuhi syarat
- Kegiatan kemitraan jaminan kesehatan nasional fisik 87% keuangan 71 % karena tidak tersedianya barang di ekatalog
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara Terpadu fisik 95% Keuangan 72% karena kegiatan manual rujukan tidak

terlaksanakarena menunggu hasil sistem rujukan on line BPJS sampai bulan Desember 2018 belum ada kepastian

- Kegiatan Kesehatan Ibu bersalin dan Bayi baru lahir fisik 95% keuangan 51% karena persyaratan klaim jampersal beberapa pasien tidak bisa dipenuhi sehingga klaim jampersal tidak bisa 100%

2. Indikator sasaran yang capaiannya masih rendah :

- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan Kesehatan penderita diabetes militus
- Pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi
- Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

B. Saran

Meningkatkan koordinasi lintas sector dan lintas program serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan promosi kesehatan sehingga indikator sasaran yang capaiannya masih rendah dapat ditingkatkan

